

LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan Iradat dan kudratNya jualah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan Kinerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pelaksanaan pencapaian konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 s/d 2026.

Laporan Kinerja (LKj) dapat digunakan oleh setiap aparatur mulai dari staf sampai pimpinan puncak instansi atau unit kerja yang peduli dalam mengukur tingkat Indikator keberhasilan kinerja pada Instansi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Tanah Laut berupa komoditas Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Karet dan Sawit. Keberhasilan sektor pengembangan pertanian tersebut diatas akan sangat dipengaruhi arah Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal ini peran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, dukungan para penyuluh pertanian dan peran para kelompok tani.

Akhirnya dengan dukungan Pimpinan dan para Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, Laporan Kinerja yang dibuat tahun 2024 dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan arah kinerja yang harus dilaksanakan kedepan terutama dalam pengembangan pertanian dan peningkatan sektor produksi khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari
Kepala Dinas



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implimentasi SAKIP guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut merupakan upaya untuk mewujudkan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 yaitu 'Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Bertumpu Pada Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata.

Strategi pencapaian tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaen Tanah Laut secara umum menyesuaikan dengan arah kebijakan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2024-2026 yang yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi".

Pembangunan Pertanian termasuk ke dalam Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Aspek inilah yang selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 berorientasi pada sasaran :

1. Meningkatnya produksi tanaman pertanian dan perkebunan,
2. Meningkatnya tata kelola adminsitasi umum, kepegawaian dan akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I.....	 1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	1
D. Cascading Kinerja.....	3
E. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	4
F. Isu Strategis.....	7
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	9
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	13
I. Sistematika Penyajian	16
 BAB II	 18
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
A. Visi RPJMD	18
B. Misi RPJMD	19
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	20
D. Indikator Kinerja Utama	22
E. Perjanjian Kinerja	23
F. Program dan Kegiatan.....	27
 BAB III.....	 31
AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	31
1. Sasaran Eselon II.....	377
2. Sasara Esselon III.....	46
3. Sasaran Eselon IV	64
B. Akuntabilitas Keuangan	70
B.1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024	70
B.2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	74

B.3 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	79
B.4. Efisiensi Penggunaan Anggaran	77
BAB IV	79
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	80
LAMPIRAN	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana salah satu dari perangkat organisasi tersebut adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD ini merupakan tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Kepada Bupati atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang dialokasikan dan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Kabupaten Tanah Laut.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja tahun 2024 ini adalah dengan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 berarti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan telah menyelesaikan kegiatan selama satu tahun anggaran, atas hasil kerja dan capaian kinerja disusun dan dituangkan dalam Laporan Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pelaporan penyampaian kinerja yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja SKPD.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja SKPD sebagai berikut :

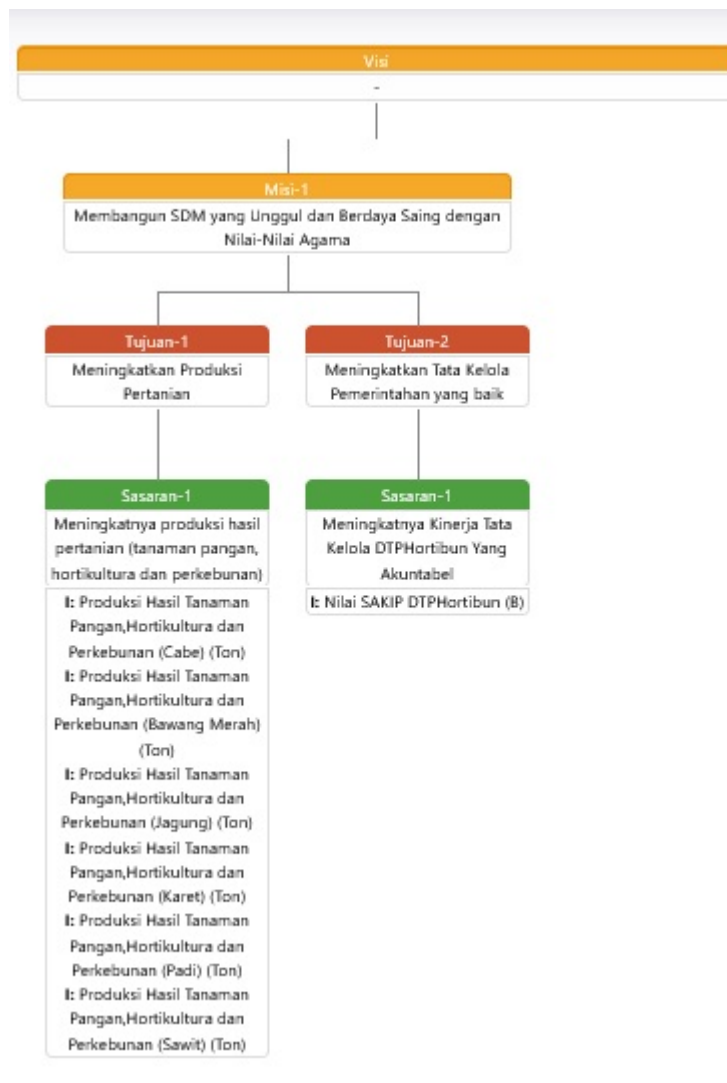
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2026;



D. Cascading Kinerja

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



Dalam cascading kinerja dijelaskan bahwa tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berupa Peningkatan ekonomi Masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berupa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan, yang dengan disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Meningkatnya hasil produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

E. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sekretaris
 - 2) Sub Bagian Perencanaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tanaman Pangan,
- d. Bidang Hortikultura,
- e. Bidang Perkebunan,
- f. Bidang Penyuluh dan PSP,
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

I. Sumber daya Manusia

Sedangkan sumber daya manusia / susunan Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 61 orang terdiri dari 35 orang PNS dan 27 orang Non PNS yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Tanaman Pangan	: 1 orang
Kepala Bidang Hortikultura	: 1 orang
Kepala Bidang Perkebunan	: 1 orang
Kepala Bidang Penyuluh dan PSP	: 1 orang
Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Ka Sub Perencanaan	: 1 orang
Ka Sub Keuangan	: 1 orang
Pengawas Benih Tanaman Muda	: 3 orang
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	: 3 orang
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	: 1 orang
Penyuluh Pertanian Muda	: 1 orang
Analisis Ketahanan Pangan Muda	: 1 orang
fungsional	: 6 orang
Staff ASN	: 9 orang

Tenaga P3K	: 17 orang
Non PNS	: 47 orang

Adapun susunan kepegawaian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: 5 orang
b. Golongan IV/b	: 2 orang
c. Golongan IV/a	: 2 orang

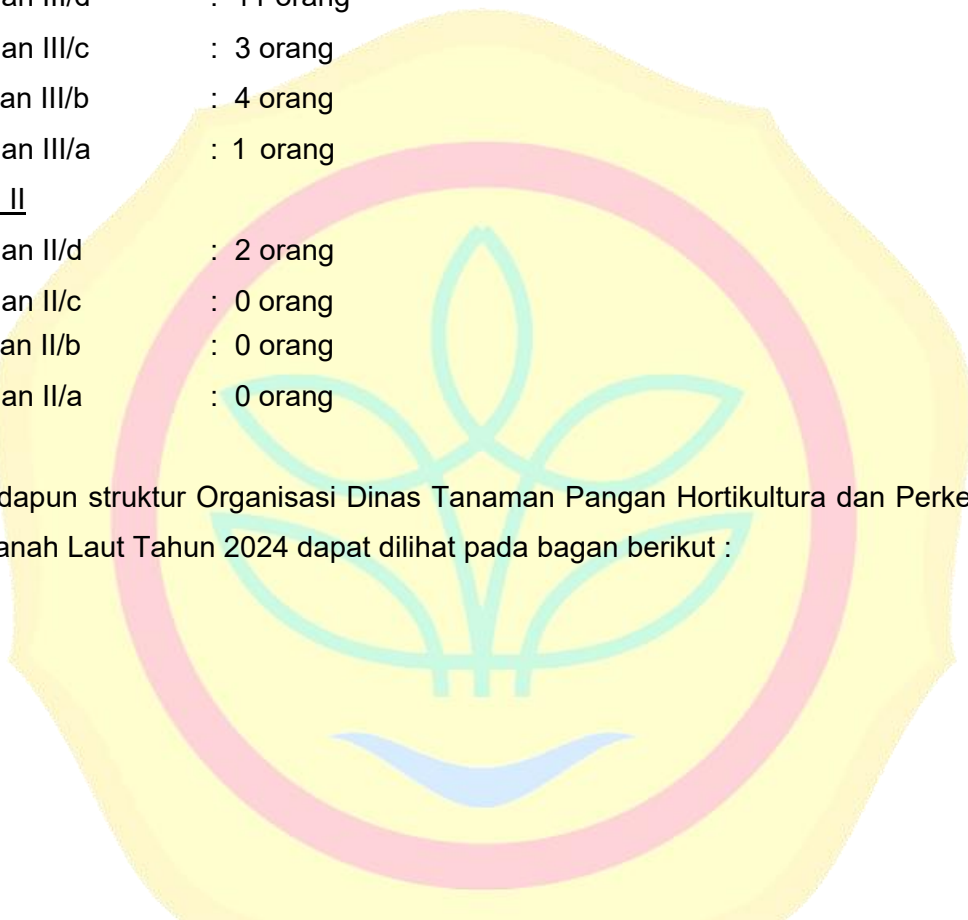
Golongan III

a. Golongan III/d	: 11 orang
b. Golongan III/c	: 3 orang
c. Golongan III/b	: 4 orang
d. Golongan III/a	: 1 orang

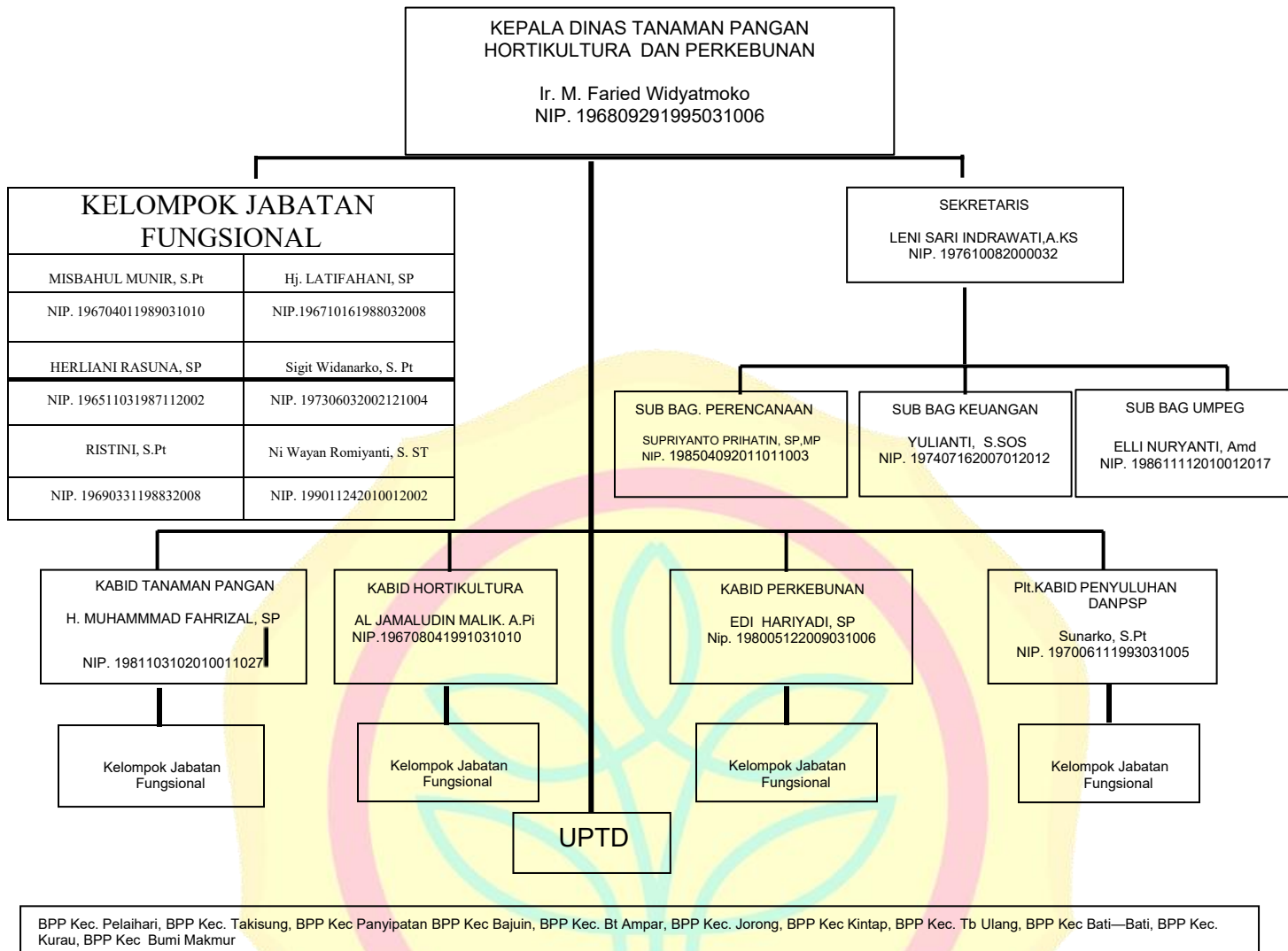
Golongan II

a. Golongan II/d	: 2 orang
b. Golongan II/c	: 0 orang
c. Golongan II/b	: 0 orang
d. Golongan II/a	: 0 orang

Adapun struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada bagan berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



F. Isu Strategis

Penjabaran isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut antara lain:

1. Terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi

Tahun 2024 merupakan dampak perubahan kebijakan pupuk subsidi yang dimulai pada tahun 2022, dimana pupuk subsidi sebelumnya untuk 70 komoditas, berubah kebijakan hanya untuk 9 komoditas (padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kakao, tebu, dan kopi). Sedangkan potensi komoditas lain pertanian di Kabupaten Tanah Laut selain 9 komoditas tersebut sangat besar, seperti Karet, Kelapa Sawit, Pepaya dan Labu.

2. Tinggi harga pupuk non Subsidi

Dampak perang Rusia dan Ukraina masih mempengaruhi pada harga pupuk, hal ini membuat harga pupuk dunia mengalami kenaikan, karena kedua negara tersebut merupakan produsen bahan baku pembuatan pupuk (pospor dan kalium), walaupun pada tahun 2024 harga pupuk mengalami penurunan, namun kenaikan harga urea masih belum normal, dengan rata-rata kenaikan sebesar 20 % sepanjang tahun 2024. Sebagai contoh harga pupuk kemasan 50 kg urea subsidi sebesar Rp. 112.500,-/sak, sedangkan harga pupuk kemasan 50 kg urea non subsidi rata-rata sebesar Rp. 300.000,-/sak.

3. Perbedaan data luas Lahan Baku Sawah (LBS)

Masih adanya perbedaan data Luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Tanah Laut terdapat perbedaan, anatara data LBS dari ATR BPN dengan data lahan baku sawah yang ada di SK Bupati Tanah Laut, jika data LBS di Tanah Laut menurut ATRN BPN sebesar 24.561,24 ha, sedangkan menurut data SK Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor : 188.45/1361-KUM/2021 sebesar 29.313,90 ha, terjadi selisih atau penurunan luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Tanah Laut sebesar 4.752,66 ha, namun data yang digunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dalam menghitung data produksi komoditas pertanian menggunakan data LBS yagn dikeluarkan oleh ATR BPN, Sampai saat ini sinkroni data LBS masih dilakukan berasama instansi terkait (Pertanian, BPS, PU dan ATR BPN),

Dari isu strategis tersebut, juga didapatkan pemetaan masalah pada tahun 2024, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sarana pembangunan daerah 2024 – 2026.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Terbatasnya infrastruktur lahan dan air seperti jalan usaha tani, jalan produksi dan jaringan irigasi serta bangunan air	Usulan yang disampaikan baik lewat musrenbang, proposal dan fokir tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	Terbatasnya dana/anggaran
	Belum berkembangnya usaha penangkaran benih / bibit	Pemasaran benih yang dihasilkan penangkar belum optimal	Belum ada kerjasama dengan perusahaan
	Distribusi pupuk bersubsidi masih belum optimal	Masih ada petani belum masuk ke kelompok tani	Rendahnya SDM petani dalam memahami pentingnya kelompok tani
	Masih rendahnya penggunaan pupuk organik	Pupuk organik yang lambat	Petani perlu hasil yang cepat
	Terbatasnya alat mesin pertanian	Jumlah Alsintan masih sedikit	Terbatasnya anggaran/dana
	Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan	Persyaratan tidak memenuhi syarat	Petani masih banyak tidak proaktif terhadap bertani dan pinjaman modal
	Minat pemuda terhadap pertanian masih rendah	Profesi sebagai petani dipandang rendah oleh sebagian masyarakat	Tingkat pendapatan petani masih rendah dari waktu kewaktu.
	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian	Lahan pertanian (kebun) lebih menguntungkan	Usaha perkebunan, pendapatan lebih menjanjikan

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Sedangkan sumber daya manusia / susunan Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 97 orang terdiri dari 33 orang PNS dan 47 orang Non PNS yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: 1 orang
Kepala Bidang Tanaman Pangan	: 1 orang
Kepala Bidang Hortikultura	: 1 orang
Kepala Bidang Perkebunan	: 1 orang
Kepala Bidang Penyuluh dan PSP	: 1 orang
Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Ka Sub Perencanaan	: 1 orang
Ka Sub Keuangan	: 1 orang
Pengawas Benih Tanaman Muda	: 3 orang
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	: 3 orang
Analisis Pasar Hasil Pertanian Muda	: 1 orang
Penyuluh Pertanian Muda	: 1 orang
Analisis Ketahanan Pangan Muda	: 1 orang
fungsional	: 6 orang
Staff ASN	: 9 orang
Tenaga P3K	: 17 orang
Non PNS	: 47 orang

Adapun susunan kepegawaian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: 5 orang
b. Golongan IV/b	: 2 orang
c. Golongan IV/a	: 2 orang

Golongan III

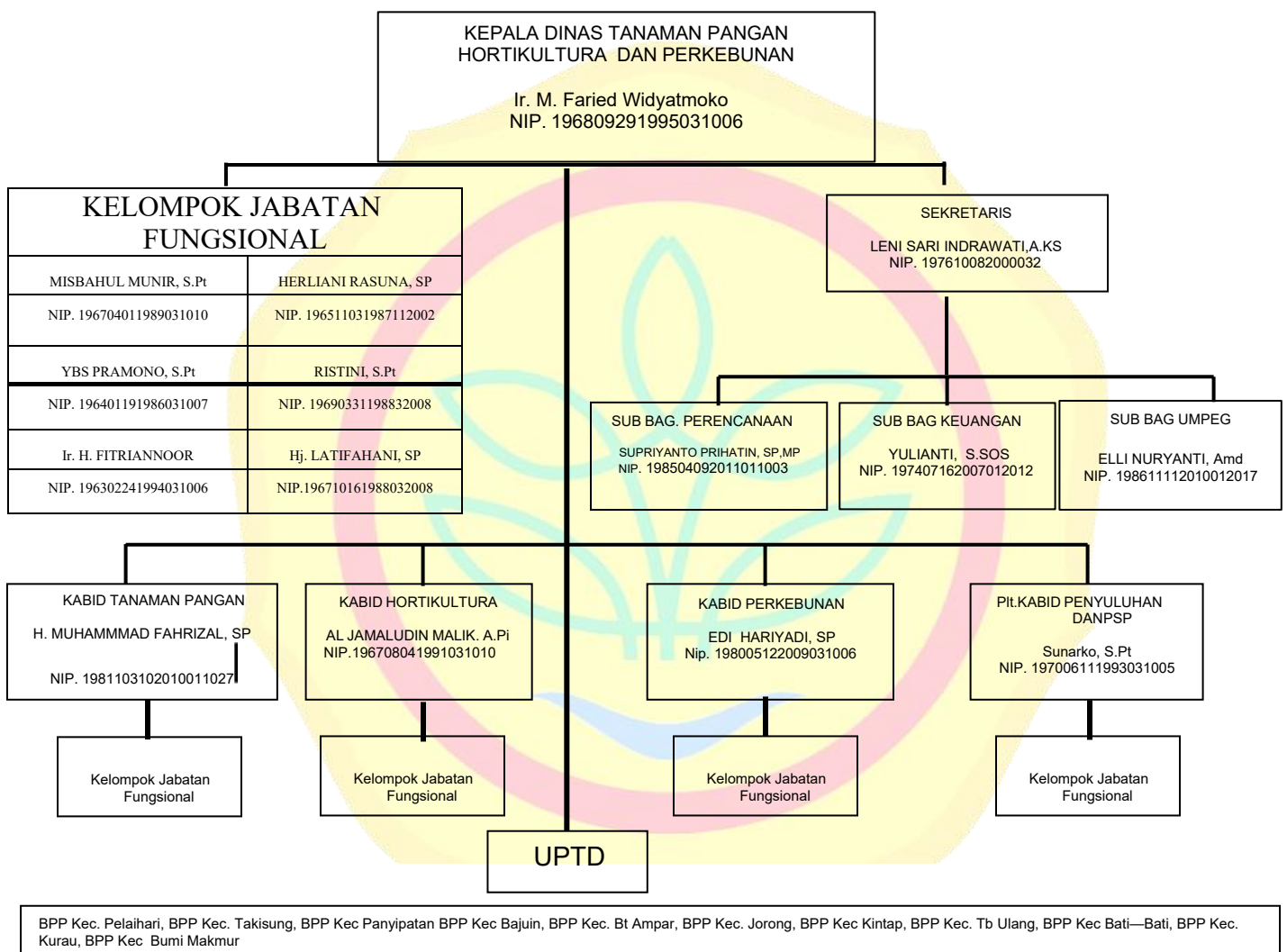
a. Golongan III/d	: 11 orang
b. Golongan III/c	: 3 orang
c. Golongan III/b	: 4 orang
d. Golongan III/a	: 1 orang

Golongan II

- a. Golongan II/d : 2 orang
- b. Golongan II/c : 0 orang
- c. Golongan II/b : 0 orang
- d. Golongan II/a : 0 orang

Adapun struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dapat dilihat pada bagan berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



Jenis Produk dan Layanan yang diselenggarakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut meliputi :

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok Sasaran	Sumber Dana
1	Bidang Tanaman Pangan • Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan • Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian • Pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi • Peningkatan produksi tanaman pangan	• Pemberian hibah saprodi berupa obat-obatan, benih dan bibit • Pinjam pakai alat mesin pertanian (alsintan) • Pelatihan, Pertemuan dan sosialisasi workshop, penyuluhan, sarasehan/diskusi • Pengadaan alsintan	• Kelompok Tani	APBD, APBD Provinsi, APBN
2	Bidang Hortikultura • Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura • Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian utk tanaman hortikultura • Pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi	• Pemberian hibah saprodi berupa obat-obatan, benih, dan bibit • Pinjam pakai alat mesin pertanian (alsintan) • Pelatihan, Pertemuan dan sosialisasi workshop, penyuluhan, sarasehan/diskusi	• Kelompok Tani	APBD, APBD Provinsi, DAK non Fisik, APBN

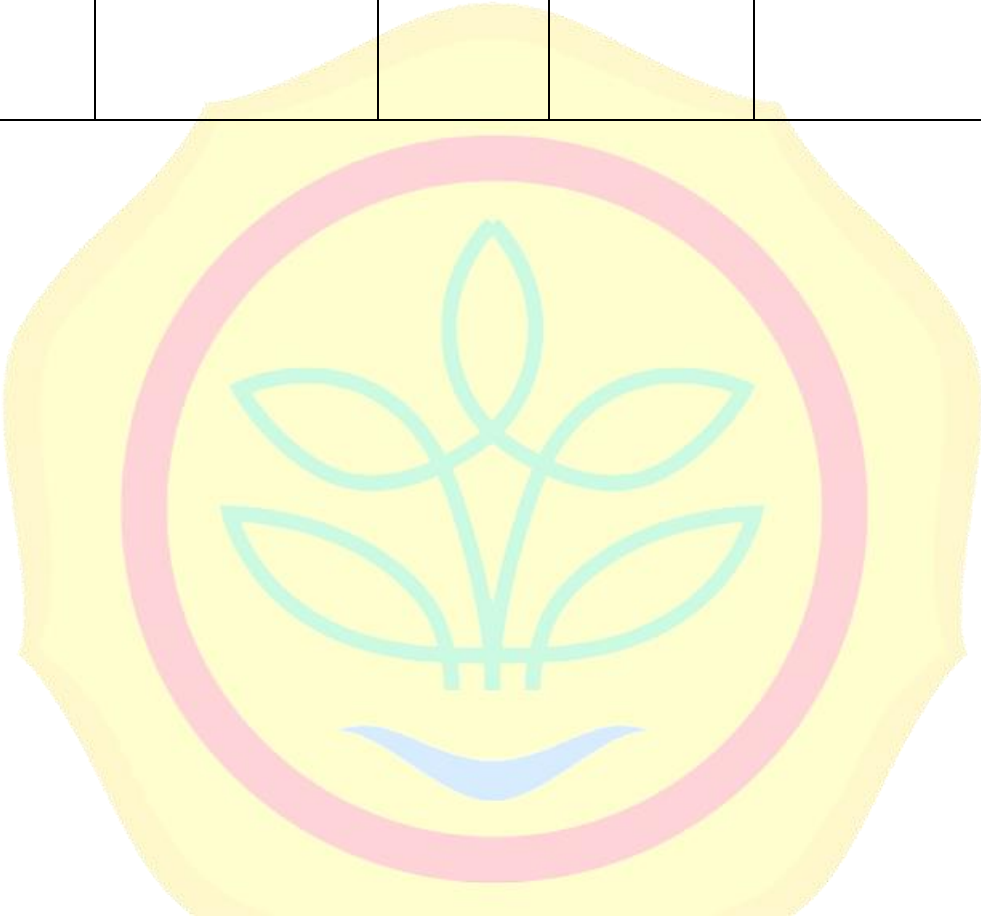
	• Peningkatan produksi tanaman hortikultura	• Pengadaan alsintan		
3	Bidang Perkebunan • Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan • Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian utk tanaman perkebunan • Pengawasan penggunaan sarana pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi • Peningkatan produksi tanaman perkebunan	• Pemberian hibah saprodi berupa obat-obatan, benih, dan bibit • Pelatihan, Pertemuan dan sosialisasi workshop, penyuluhan, saran ehan/diskusi	• Kelompok Tani	APBD, APBD Provinsi, APBN
4.	Bidang Penyuluh & PSP • Pembangunan/ rehabilitasidan pemeliharaan jalan usaha tani (JUT) • Penyusunan standar pelayanan public pemberian rekomendasi usaha pertanian • Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian • Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian	• Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi • Rekomendasi pinjam pakai alsintan • Pemberian pupuk bersubsidi • Pemanfaatan pupuk organik	• Kelompok Tani	APBD, APBD Provinsi, APBN

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

No	Komponen	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja	Dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan dipublikasi melalui website skpd, dan juga menyampaikan tepat waktu	Dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan dipublikasi melalui website skpd, dan juga menyampaikan tepat waktu	1 Dokumen	Februari 2023	Sekretrais & Bagian Perencanaan	Sesuai	https://drive.google.com/file/d/1M22clJAfuaGEMsg345QRTuGCSV96SiZb/view
2	Pengukuran Kinerja	Belum menampilkan data efisiensi anggaran dan SDM pada masing-masing capaian kinerja pada BAB III Laporan Kinerja.	dapat data efisiensi anggaran dan SDM pada masing-masing capaian kinerja pada BAB III Laporan Kinerja halaman 77-78 dan LKPJ BAB III pada halaman 10	1 Dokumen	Desember 2023	Sekretrais & Bagian Keuangan	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1HthLUZfaw0Vs6Dv39KLqnhIA3Joolnpm
3	Pelaporan Kinerja	Agar Dokumen Laporan Kinerja dalam publikasi atau penyampaian tepat waktu ke bagian organisasi SETDA, hal ini untuk menjamin kualitas pelaporan kinerja SKPD	Tanda Terima Penyampaian Laporan Kinerja dalam publikasi atau penyampaian tepat waktu ke bagian organisasi SETDA	1 Dokumen	Desember 2023	Sekretrais & Bagian Perencanaan	Sesuai	https://drive.google.com/drive/folders/1Fn4JhY0pA-LsUgdgyHJ2yD7uSnVhhBT?usp=drive_link
		Perlunya Dokumen Laporan Kinerja SKPD hanya membandingkan dengan data tahun 2023, harus juga dengan tahun sebelumnya, minimal	Dokumen Laporan Kinerja SKPD menyampaikan data dari tahun 2022 sampai dengan 2024	1 Dokumen	Per Semeseter 2023	Sekretrais & Bagian Perencanaan	Sesuai	

		kinerja tiga tahun terakhir						https://drive.google.com/drive/folders/13iPEg5A4yXWmnkKXCXgP4aLBkALqTRXM?usp=drive_link
		Agar Dokumen laporan kinerja SKPD belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai kinerja pada BAB III.	Terdapat data efisiensi anggaran dan SDM pada masing-masing capaian kinerja pada BAB III Laporan Kinerja halaman 77-78	1 Dokumen	Per Triwulan	Sekretrais & Bagian Perencanaan	Sesuai	https://drive.google.com/file/d/1f9Tf3LDX8rvUrEE3aDlt8ZKm4ctM95eq/view?usp=drive_link
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar SKPD melakukan monev secara berjenjang dan dilakukan dengan pendalaman terhadap capaian kinerja secara berjenjang, membuat Dokumen Monev dengan analisis yang didasarkan data kinerja secara berjenjang	Telah dilaksanakan monev secara berjenjang dan dilakukan dengan pendalaman terhadap capaian kinerja secara berjenjang, membuat Dokumen Monev dengan analisis yang didasarkan data kinerja secara berjenjang	12 kali	Januari s/d Desember 2023	Sekretrais & Bagian Perencanaan	Sesuai	https://drive.google.com/file/d/19s4IGE5v3ffKHTu41nPM51iHSGCsGGNS/view?usp=drive_link
		Agar hasil evaluasi internal dapat	hasil evaluasi internal pada Distanhorbun dapat	1 dokumen	Juli 2023	Sekretrais & Bagian Perencanaan	Sesuai	

		digunakan untuk peningkatan kinerja.	digunakan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang					https://drive.google.com/drive/folders/1B56yQK29t1ISLGJ3apQDRW_GSwQ8J2Y?usp=drive_link
--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---



I. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- F. Isu Strategis
- G. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II (Kepala Dinas)
 3. Eselon III (Sekretaris)
 - 1) Eselon IV (Kasubbag)
 4. Eselon III (Kepala Bidang)
- B. Akuntabilitas Keuangan
 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN :

1. IKU
2. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bertandatangan
3. Cascading/Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
5. Monev Renstra
6. Matrik Keselarasan



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD, maupun Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 - 2026 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

A. Visi RPJMD

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”, dan menjadi acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Rumusan Visi yang jelas diharapkan mampu : (a) meningkatkan pembangunan manusia, (b) menciptakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, serta (c) meningkatkan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih baik.

Visi Instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur Organisasi sehingga menjadi Visi bersama (*shared vision*) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber Organisasi.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Perkebunan.

B. RPD (Rencana Pembangunan Daerah)

Dalam pembangunan Pertanian diperlukan adanya keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku untuk menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, sesuai dengan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025 yaitu ‘Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Bertumpu Pada Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata.

Pembangunan Pertanian termasuk ke dalam Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Aspek inilah yang selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Dengan konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 “Tanah Laut Berdaya Saing” yang mempunyai arti bahwa Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mempunyai nilai daya saing yang lebih baik, sehingga nilai jual produk pertanian Tanah Laut bisa lebih tinggi.

Berbagai program dan kegiatan akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai peningkatan produksi komoditas pertanian yang disesuaikan dengan kondisi keadaan pasca pandemi dan isu strategis, seperti Pengendalian Inflasi, Pencegahan Stunting, Program Swasembada dan Penyangga Pangan Ibu Kota Negara (IKN).

Program Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dan Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang ada di Bidang Hortikultura yang kegiatannya berupa peningkatan jumlah produksinya dengan cara pengembangan kawasan produksi cabe, bawang merah dan Jahe yang bertujuan untuk Pengendalian Inflasi.

Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) berupa kegiatan Pemberdayaan Petani untuk memanfaatkan pekaranganny agar diolah dan ditanami tanaman hortikultura untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga dalam mencegah Stunting.

Sebagai upaya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam mencapai Swasembada dan Penyangga Pangan Ibu Kota Negara (IKN), dilakukan melalui sebuah inovasi “TALA BUNGAS” (Tanah Laut Sentra Beras), yang pokok kegiatannya berupa Gerakan Tanam Padi Hibrida dan Padi Unggul Umur Pendek untuk meningkatkan Produksi pangan pokok yaitu beras yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 -2026, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Instansi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 s/d 2026.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Adapun tujuan yang ingin diwujudkan sesuai Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk tiga tahun kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan produksi tanaman pertanian dan perkebunan
2. Meningkatkan tata kelola administrasi umum, kepegawaian, dan akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.



Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari Tujuan dan menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun. Sasaran juga memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, teruji, dapat diukur dan dapat dicapai serta saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut periode tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi tanaman pertanian dan perkebunan
2. Meningkatnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, dan akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

SASARAN STRATEGIS TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya produksi tanaman pertanian dan perkebunan	Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ton) • Padi • Jagung • Kedelai • Cabe • Bawang Merah • Karet • Sawit	144.100 122.982 72 2.360,1 11,11 14.887,3 51.730,42
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai SAKIP	B

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan uraian serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel Indikator Kinerja Utama
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024

No.	Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab / Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	produksi pertanian : Padi, Jagung, Kedelai, Cabe, Bawang Merah, Kelapa Sawit, Karet .	$\sum \text{Produktivitas} \times \sum \text{Luas Panen}$	Kadis, Kabid Tanaman Pangan, Kabid Hortikultura, Kabid Perkebunan.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2024 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 (Perjanjian Kinerja terlampir).

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	PK Eselon II (Kepala Dinas)		
	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi pertanian (ton) : Padi Jagung Cabe Bawang Merah Karet Sawit	144.300 123.136 2.370,1 11,231 15.182,3 52.920,21
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai Sakip	B
2.	PK Eselon 3 (Kabid TP)		
	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam tanaman pangan : Padi Jagung	36.169 ha 20.538 ha
		Luas panentanaman pangan : Padi Jagung	36.025 ha 20.497 ha

3.	PK Eselon 3 (Kabid Hortikultura)		
	Meningkatnya Luasan Tanaman Hortikultura	Luas tanam Hortikultura : Cabe Bawang Merah	270 ha 35 ha
		Luas Panen Tanaman Hortikultura Cabe Bawang Merah	325 ha 35 ha
4.	PK Eselon 3 (Kabid Perkebunan)		
	Meningkatnya Luasan Areal Tanaman Perkebunan	Tanaman Areal Perkebunan : Karet Sawit	300 Ha 220 Ha
	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi komoditas Unggulan Perkebunan	100%



5.	PK Eselon 3 (Penyuluhan dan PSP)		
	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM Penyuluh Yang Bersertifikat profesi	2 Orang (100%)
		Persentase Kelompok Tani Yang Terampil	1.700 kel. (60%)
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Alsintan Yang Dapat Dimanfaatkan	170 buah (100%)
		Persentase Kelompok Tani Yang Memanfaatkan Pupuk Bersubsidi	21.000 orang (100%)
		Persentase jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan	4 unit (100%)
		Persentase Jalan produksi yang dapat dimanfaatkan	38 unit (100%)
6.	PK Eselon 3 (Sekretaris)		
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	B
	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terkelolanya Admnistrasi Umpeg, Baik dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Terkelolanya Administrasi Perencanaan yang baik dan tepat waktu	100%
		Persentase Terkelolanya administrasi Keuangan yang baik dan tepat waktu	100%
	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dikelola dan Dapat Dimanfaatkan	100%
7	PK Eselon 4 (kasubbag umpeg)		
	Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%

	Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Perangkat Daerah	Presentase aset dalam kondisi baik	80%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran	Presentase layanan Perkantoran sesuai SOP	4.173 unit
8	PK Eselon 4 (kasubbag Perencanaan)		
	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100 %
	Meningkatnya Keselarasan dokumen Renja dengan Renstra	Keselarasan sasaran Renja dengan Renstra	100 %
	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah	Presentase hasil Monev kinerja yang ditindaklanjuti	100 %
	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Distanhorbun	Presentase Dokumen Pelaporan Distanhorbun yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %
	Meningkatnya kepatuhan Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	Presentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%
9	PK Eselon 4 (kasubbag Keuangan)		
	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Distanhorbun	100 %
	Meningkatnya penyusunan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran	Jumlah dokumen realisasi keuangan yang dilaporkan	12 Dokumen
		Jumlah dokumen realisasi SPJ yang dipertanggungjawabkan	2.500 Berkas

F. Program dan Kegiatan

Adapun capaian kinerja keluaran program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten TanahLaut tahun 2024 dalam rangka pendukung pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Capaian Kinerja Fisik	Anggaran (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
					Fisik		Keuangan			
					Kinerja	%	Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7=(6/4)	8	9	10= (5-8)	11
3.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN			61.108.137.157		98,00	55.615.224.851	91,01	5.492.912.306	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.127.642.672			24.973.980.121	92,06	2.153.662.551	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.999.475			19.999.200	100,00	-	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen	6 Dokumen	9.999.682	6 Dokumen	100,00	9.999.682	100,00	-	1. DPA, 2. DPA Perubahan, 3. Renja, 4. Renstra, 5. RKA, 6. Laporan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan	6 Dokumen	9.999.793	6 Dokumen	100,00	9.999.793	100,00	-	1. RB, 2. IKM, 3. LAKIP, 4. LKP, 5. LPPD, 6. Laporan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.979.898.913			21.025.050.523	91,49	1.954.848.390	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji daan tunjangan ASN	12 Bulan	22.969.900.043	12 Bulan	100,00	21.015.051.723	91,49	1.954.848.320	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah laporan	24 Laporan	9.998.870	24 Laporan	100,00	9.998.800	99,99	-	12 Laporan Gaji, 12 laporan TPP
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			250.793.500			216.509.900	86,33	-	
3.27.01.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	142 Paket	150.793.500	142 Paket		116.509.900	77,26		
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah orang	30 orang	100.000.000			100.000.000	100	-	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.541.954.582			1.525.021.409	98,90	16.933.173	

3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis	6 jenis	19.990.486	6 Jenis	100,00	19.980.000	99,95	10.486	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis jumlah unit	17 jenis 60 unit	299.998.359	17 jenis 60 unit	60,00	289.586.808	96,53	10.411.551	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19.992.954			17.383.000	86,95	2.609.954	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah jenis	6 Jenis	49.997.783	6 Jenis	100,00	47.244.400	94,49	2.753.383	1. Baliho, 2. Banner, 3. Cetak, 4. Fotocopy, 5. Spanduk
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis	4 Jenis	3.000.000	4 Jenis	100,00	2.500.000	83,33	500.000	1. Jurnal, 2. Surat Kabar, 3. Majalah, 4. Tabloid
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			15.000.000			15.000.000	100		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perdin	15348 kali	1.133.975.000	15347 Kali	99,99	1.133.327.201	99,94	647.799	12 Bulan
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	1 Unit	99.893.712	1 Unit	100	85.885.000	85,98	14.008.712	
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	83.112.558	7 Unit		81.924.000	98,57	1.188.558	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.656.329.932			1.535.357.410	92,70	120.972.522	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000			1.500.000	100		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis	4 jenis	359.500.000	4 Jenis (12 Bulan)	100,00	286.864.258	79,80	72.635.742	1. Telpon, 2. Air, 3. Listrik, 4. Internet
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ptt	12 bulan	1.295.329.932	12 Bulan	100,00	1.248.493.152	96,38	46.836.780	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			495.660.000			48.423.2679	97,69	11.427.321	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan yang dipelihara	1 unit	35.000.000	1 Unit (12 Bulan)	100,00	35.000.000	100		(12 Bulan) Kendaraan Jabatan Kadistan
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4	107 unit	285.300.000	107 Unit	100,00	285.197.679	99,96		Kendaraan Operasional Dinas
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis	10 Jenis	65.000.000	10 Jenis	100,00	65.000.000	100		(12 Bulan) Kendaraan Jabatan Kadistan
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung dan jumlah jenis	2 gedung 4 jenis	110.360.000			99.035.000	89,74	11.325.000	

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.184.187.846			2.799.130.450	87,91	385.057.396	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.872.769.526			2.515.534.886	87,56	357.234.640	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengadaan Combine Harvester	2 Unit	1.688.782.911	2 Unit	100,00	1.547.318.150	91,62	141.464.761	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pelatihan, Pertemuan, Sosialisasi, Workshop Jumlah Kegiatan NBOS , LP2B	37 Kali	1.183.986.615	37 Kali	100,00	968.216.736	81,78	215.769.879	1. Bidang TP 25 Kali 2. Bidang Bun 4 Kali 3. Bidang Horti 7 Kali 4. Kegiatan NBOS 1 Kali
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			24.770.446.312			22.368.038.500	90,30	2.402.407.812	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			5.249.108.124			4.388.098.516	83,60	861.009.608	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			221.149.510			99.263.836	44,89	121.885.674	
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			4.687.983.714			4.042.253.680	86,23	645.730.034	
3.27.03.2.01.16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota			249.974.900			239.016.000	95,62	10.958.900	
3.27.03.2.01.17	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			90.000.000			7.565.000	8,41	82.435.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			19.521.338.188			17.979.939.984	92,10	1.541.398.204	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan produksi dan jalan usaha tani	46 unit 24 unit	19.521.338.188	46 unit 24 unit	100,00	17.979.939.984	92,10	1.541.398.204	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			916.415.418			788.949.280	86,09	127.466.138	

3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			916.415.418			788.949.280	86,09	127.466.138	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah pertemuan	42 kali	542.734.862	42 Kali	100,00	456.786.978	84,16	85.947.884	1. Bidang TP 2. Bidang Bun 3. Bidang Horti
		Jumlah Pengadaan	1 Paket		1 Paket					4. Pengadaan Paket Obat-obatan
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			373.680.556			332.162.302	88,89	41.518.254	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			3.090.589.784			2.831.687.200	91,62	258.902.584	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.090.589.784			2.831.687.200	91,62	258.902.584	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	jumlah berkas dan Sop	340 berkas (1 sop)	3.090.589.784	340 berkas	100,00	2.831.687.200	91,62	258.902.584	Rekomendasi Pinjam Pakai Alat
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			2.018.855.125			1.853.439.300	91,81	165.415.825	
3.27.07..2.01	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian			2.018.855.125			1.853.439.300	91,81	165.415.825	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	jumlah BPP	11 unit	977.055.125	11 Unit	100,00	886.764.300	90,76	90.290.825	
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	jumlah BPP	3 unit	1.041.800.000	3 Unit	100,00	966.675.000	92,79	75.125.000	Pembangunan dan Renovasi Pembangunan BPP dan Sarana Keinformasian BPP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

I. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 s/d 2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”, dengan konsep yang mempertimbangkan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

Dari keempat hal tersebut didapatkan 3 aspek utama yang dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Pembangunan Pertanian termasuk ke dalam Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Aspek inilah yang selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Dengan konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 “Tanah Laut Berdaya Saing” yang mempunyai arti bahwa Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mempunyai nilai daya saing yang lebih baik, sehingga nilai jual produk pertanian Tanah Laut bisa lebih tinggi.

Peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan program kerja yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sesuai rencana strategis yang diturunkan dalam bentuk rencana kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan indikator Distanhorbun dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran
1	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sektor unggulan daerah	Meningkatnya produksi komoditas pertanian	Peningkatan produksi pertanian

Tabel Sasaran RPD dan Pencapaian IKU Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah produksi pertanian (ton) • Padi 144.300 • Jagung 123.136 • Bawang Merah 11,23 • Cabe 2.370,10 • Karet 15.182,30 • Sawit 52.920,21		169.270 123.739 120 2.857 21.354 75.235	117,30% 100,49% 1068,57% 120,54% 140,65% 142,17%

Sumber Data : Distanhorbun 2024

Indikator : Jumlah produksi Pertanian : Padi, Jagung, bawang merah, cabe, sawit dan karet.

Berdasarkan tabel sasaran RPD tahun 2024 sektor pertanian pada 6/enam komoditas (padi, jagung, bawang merah, cabe, karet dan sawit) telah mengalami kenaikan produksi untuk tahun 2024.

Pencapaian target produksi pada komoditas Tanaman Pangan (padi dan jagung) bisa terpenuhi dikarenakan adanya Program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) seluas 16.541 ha, dan adanya Program Tala Bungas, yaitu Tanah Laut Lumbung Beras, berupa kegiatan dalam upaya peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) dan Intensifikasi (penggunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), tidak adanya kekeringan/kemarau lama sehingga kegiatan Gernas (Gerakan Nasional) percepatan tanam bisa dilaksanakan, Gernas yaitu gerakan untuk mengatur jadwal tanam yang menyesuaikan dengan keadaan iklim/cuaca, sehingga tanaman padi dan jagung bisa terpenuhi kebutuhan airnya dan dapat berkembang/tumbuh dengan baik dan

tahan terhadap serangan hama penyakit tanaman, penyebab pencapaian produksi sesuai target adalah adanya bantuan saprodi berupa benih/bibit dan pupuk baik dari kementerian pertanian, maupun dari provinsi, sehingga target produksi padi di Kabupaten Tanah Laut bisa terpenuhi.

Sedangkan penyebab kenaikan produksi komoditas hortikultura (cabe dan bawang merah) adalah adanya program berupa Pekarangan Pangan Lestari (P2L) untuk mengembangkan budidaya cabe dan bawang merah yang tujuan utamanya untuk pemenuhan pangan keluarga dan mengurangi inflasi, dan berkurangnya serangan hama dan penyakit tanaman, karena petani menggunakan benih yang hibrida/unggul, sehingga tanaman hortikultura tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dan tidak adanya kekeringan pada tahun 2024.

Pada komoditas perkebunan (karet dan sawit) kenaikan produksinya disebabkan adanya penambahan areal tanam karet seluas 253 ha dan penambahan laua areal sawit sebanyak 325 ha, tidak adanya kemarau panjang/kekeringan, adanya program peremajaan sawit rakyat (PSR) dari Kementerian Pertanian dan adanya bantuan saprodi berupa pembeku lateks dan bantuan pupuk organik cair baik dari APBN, maupun APBD.

TABEL REALISASI PRODUKSI TAHUN 2022 s/d 2024

No	Komoditas	Realisasi Produksi (ton)			KenaikanProduksi (ton)		PenurunanProduksi (ton)	
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
1	Padi	143.962	147.410	169.270	3.448,06	21.859,94	-	-
2	Jagung	122.835	123.060	123.739	225	679	-	-
3	Cabe	2.350,9	2.786,33	2.857,00	435,43	70,67	-	-
4	Bawang Merah	11,0	111,48	120	100,48	8,52	-	-
5	Karet	14.601,7	19.699,9	21.354	5.098,20	1.654,10	-	-
6	Kelapa Sawit	50.865,7	73.229,7	75.235	22.344	2.005,30	-	-
	Jumlah	334.626,3	363.511,08	392.575,00	31.651,17	26.277,53	-	-

Sumber Data : Distanhorbun 2024

I.1 Perbandingan Dengan Produksi Nasional

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, pada komoditas padi, produksi pada padi nasional tahun 2024 sebesar 52,66 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 1,32 juta ton atau penurunan 2,45 % dibandingkan produksi tahun 2023, sedangkan produksi padi di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan sebesar 21.859,94 ton atau kenaikan sebesar 14,83 %.

Pada produksi jagung nasional pada jagung pipilan kering di tahun 2024 sebesar 15,21 juta ton, atau mengalami kenaikan sebesar 14,77 juta ton atau sebesar 2,93% dibandingkan produksi tahun 2023, sedangkan produksi jagung di Kabupaten Tanah Laut sendiri pada tahun 2024 sebesar 123.739 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 679 ton atau sebesar 0,55 %.

Pada komoditas hortikultura berupa cabe, dimana untuk produksi cabe secara nasional sebanyak 1,78 juta ton, atau mengalami kenaikan sebesar 14,8 %, sama dengan kenaikan cabe nasional, produksi cabe di Tanah Laut sebesar 2.857 ton atau juga mengalami kenaikan sebesar 70,67 ton atau sebesar 2,54 % daripada produksi tahun 2023.

Bawang merah secara nasional sebesar 2 juta ton atau mengalami kenaikan produksi sebesar 1,52 % dibandingkan dengan produksi pada tahun 2023 sebesar 1,97 juta ton, produksi bawang merah di Kabupaten Tanah Laut juga mengalami kenaikan sebesar 8,52 ton atau sebesar 7,64 % jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2023.

Berdasarkan data dari BPS untuk komoditas unggulan selanjutnya pada bidang perkebunan adalah karet, dimana produksi karet secara nasional tahun 2023 sebanyak 2,15 juta ton turun sebesar 4,01 % dibandingkan tahun 2023 sebanyak 2,24 juta ton, sedangkan produksi karet di Kabupaten Tanah Laut mengalami kenaikan sebesar 1.654,10 ton atau naik sebesar 8,40 % dibanding produksi tahun 2023.

Pada komoditas kelapa sawit produksi secara nasional sebanyak 43,30 juta ton dimana jumlah tersebut menurun sebesar 5 % dibandingkan produksi tahun 2023 sebesar 45,46 juta ton, sedangkan produksi kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 sebesar 75.235 ton atau mengalami peningkatan sebesar 2.005,30 ton atau sebesar 2,74 dibanding produksi tahun 2023%.

Dari tabel diatas pada tahun 2024 realisasi produksi 6/enam komoditas (padi, jagung, bawang merah, cabe, karet dan sawit) mengalami kenaikan realisasi produksi dibandingkan tahun 2023, hal ini disebabkan karena adanya Optimalisasi Lahan Rawa (opla), Gerakan Nasional Percepatan Tanam, menurunnya serangan hama penyakit tanaman (Tungro), adanya bantuan sarana produksi/saprodi dari pusat/kementerian dan adl APBD Provinsi baik berupa benih/bibit, pupuk dan obat-obatan.

Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan produksi diantaranya :

1. Memberikan pembinaan kepada para petani secara terus menerus melalui para penyuluh petani dan pengamat hama penyakit tanaman agar selalu berupaya melakukan pola tanam sesuai ketentuan.
2. Memanfaatkan atau mengusulkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) ataupun APBN dalam pengembangan pertanian baik untuk pembangunan infrastruktur pertanian maupun pengadaan sarana produksi pertanianlainnya.
3. Membina petani dalam pengolahan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan
4. Memberikan informasi kepada petani mengenai pinjaman modal baik melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan fasilitas pinjaman lainnya dari Pemerintah agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan masa tanam.

Rencana aksi yang dilakukan oleh Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut dalam upaya untuk meningkatkan produksi diantaranya :

1. Melaksanakan pembinaan kepada para petani baik melalui penyuluh pertanian dan pengamat hama penyakit tanaman yang tersebar di 11 BPP/ 11 kecamatan, maupun pembinaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang Teknis pada Distanhorbun
2. Berkoordinasi dan mengajukan proposal untuk usulan dana DAK dan APBN yang dapat membantu para petani untuk mendapatkan bantuan saprodi dan lain-lain.
3. Memberikan pelatihan pembuatan pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan sebagai pengganti dari pupuk kimia
4. Menginformasikan dan membantu para petani yang ingin mengajukan usulan pinjaman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

TABEL PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022 s/d 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Keterangan
	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target (ton)	Realisasi (ton)	Capaian (%)	Target Akhir Restra
Jumlah Produksi Hasil Pertanian										
Padi	150.000	143.962	95,97	144.100	147.410	102,30	144.300	169.270	117,30	144.850
Jagung	120.000	122.835	102,36	122.982	123.060	100,06	123.136	123.739	100,49	123.495
Bawang Merah	8,18	11,0	134,47	11,11	111,48	1003,42	11,23	120	1068,57	11,51
Cabe	1.698	2.350,9	138,45	2.360,1	2.786,33	118,06	2.370,10	2.857	120,54	2.392,80
Karet	13.500	14.601,7	108,16	14.887,3	19.699,9	132,33	15.182,30	21.354	140,65	15.800,20
Sawit	46.000	50.865,7	110,58	51.730,4	73.229,7	141,56	52.920,21	75.235	142,17	56.109,80

Pada capaian produksi tahun 2022 pertahun untuk komoditas padi mengalami penurunan capaian produksi pertahun, sedangkan untuk komoditas jagung, cabe, bawang merah, karet dan sawit telah mengalami kenaikan capaian tingkat produksi pertahunnya.

Sedangkan pada tahun 2023 capaian produksi ke 6/enam komoditas padi, jagung, cabe, bawang merah, karet dan sawit semuanya mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan dari keenam komoditas tersebut sebesar 135,64 % per tahunnya.

Capaian produksi pada tahun 2024 untuk ke 6/enam komoditas padi, jagung, cabe, bawang merah, karet dan sawit semuanya mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan dari keenam komoditas tersebut sebesar 281,62 % per tahunnya.

II. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2022

1. Sasaran Eselon II

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Capaian Produksi)	Realisasi (Capaian Produksi)	Capaian %
1.	Meningkatnya Produksi komoditas pertanian	Produksi pertanian (ton)			
		Padi	144.300	169.270	117,30
		Jagung	123.136	123.739	100,49
		Bawang Merah	11,23	120	1068,57
		Cabe	2.370,10	2.857	120,54
		Karet	15.182,30	21.354	140,65
		Kelapa Sawit	52.920,21	75.235	142,17
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai Sakip	B	A	A

Sasaran : Meningkatnya Produksi komoditas pertanian

Indikator : Produksi pertanian

Tahun 2024 untuk mendukung kegiatan indikator ini dilakukan dengan kegiatan yang didukung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Teknis , yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan :
 - Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, kegiatan yang dilaksanakan berupa : Demplot/percontohan tanaman budidaya, pelatihan/pendampingan kepada petani, studi tiru dan penegndalian inflasi).
 - Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, kegiatannya berupa : Bantuan pupuk, pelatihan budidaya, bantuan alat mesin pertanian.
 - Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, kegiatannya berupa : pelatihan perbanyak tanaman, dan pendaftaran HAKI.
 - Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman, kegiatannya berupa : kegiatan pengembangan kultur jaringan dan honor petugas laboratorium.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan :
 - Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota, kegiatannya berupa : AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi, kegiatan pengawasan Pupuk, pembinaan Alsintan, bantuan bibit padi dan pupuk.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota, kegiatannya berupa : Belanja Konsultan Luas Lahan Sawah & Pertemuan dengan petani.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, kegiatannya berasal dari Dana Bagi Hasil Sawit, yang kegiatannya berupa Pemetaan sawit rakyat

- Sub Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian, kegiatan dari Dana Insentif fiskal dan dana Bagi Hasil Sawit (DBH), yang kegiatannya berupa : pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), kegiatan pemanfaatan perkarangan pangan lestari (P2L), dan Sistem perkebunan sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (ISPO)
- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, kegiatannya berupa : pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi (JP/JUT).
- 3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan :
 - Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, kegiatannya berupa : Pengadaan Pestisida dan Rapat evaluasi penanganan hama penyakit tanaman.
 - Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, kegiatannya berupa : Pengadaan bibit dan pelatihan kepada petani
- 4. Program perizinan usaha pertanian dengan :
 - Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian, kegiatannya berupa : Bantuan pupuk organik cair, Pengadaan pupuk kimia dan pelatihan budidaya petani pekebun.
- 5. Program penyuluhan pertanian dengan :
 - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, kegiatannya berupa : Penyuluhan kepada petani, pembinaan kepada Penyuluh Lapangan (PPL).
 - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian, kegiatannya berasal dari Dana Bagi Hasil Sawit, yang kegiatannya berupa Pemetaan sawit rakyat

Tabel : Target dan Realiasi Capaian Daerah tahun 2022, 2023 dan 2024.

No	Indikator	Komoditas	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Produksi Pertanian (ton)							
		Padi (ton)	150.000	144.100	144.300	143.962	147.410	169.270
		Jagung	120.000	122.982	123.136	122.835	123.060	123.739
		Cabe	1.698	2.360,1	2.370,10	2.350,90	2.786,33	2.857
		Bawang Merah	81,8	11,11	11,23	11,00	111,48	120
		Karet	13.500	14.887,3	15.182,30	14.601,70	19.699,9	21.354
		Kelapa Sawit	46.000	51.730,42	52.920,21	50.865,70	73.229,7	75.235
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Nilai Sakip	B	B	B	BB	BB	A

Sumber : Distanhorbun Tanah Laut 2024.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perbandingan capaian produksi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut pada komoditas tersebut diatas jika dibandingkan dengan capaian produksi data tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada komoditas tersebut capaian produksi pada tabel tahun 2022, 2023 dan 2024.

III. Analisa Keberhasilan/Kegagalan, Hambatan dan Langkah-Langkah Antisipasi.

Data Produksi Komoditas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, 2023 dan 2024

No	Komoditas	Produksi (Ton) 2022	Produksi (Ton) 2023	Produksi (Ton) 2024	Kenaikan Produksi (Ton) 2024	Penurunan Produksi (Ton) 2024
1.	Padi	819.419	875.546	979.359	103.813	-
2.	Jagung	152.255,06	112.150,44	120.704,39	8.553,95	-
3.	Bawang Merah	246	483,5	479,4	-	4,1
4.	Cabe	16.648	13.255,1	13.579	353,9	-
5.	Karet	158.800	153.200	154.034	834	-
6.	Sawit	1.343.000	1.131.500	1.272.785	141.285	-

dapat dilihat dari gambaran tabel diatas komoditas pertanian Provinsi Kal-Sel untuk komoditas bawang merah, mengalami penurunan produksi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 hal ini :

1. Analisa

1. Pada komoditas tanaman bawang merah, penurunan produksi diakibatkan adanya modal yang cukup besar untuk budidaya tanaman bawang merah, rata-rata sebesar Rp. 80.000.000,-/ha, sehingga petani kesulitan untuk pengembangan bawang merah.
2. Penurunan produksi pada bawang merah di Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan adanya alih fungsi lahan tanaman bawang merah ke tanaman perkebunan (kelapa sawit) yang mengakibatkan penurunan produksi bawang merah.
3. Dampak perubahan iklim juga berpengaruh pada komoditas bawang merah di Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami serangan penyakit muller,yang mengakibatkan kenaikan produksi tidak begitu besar.

2. Kendala

1. Adanya serangan hama penyakit tanaman secara besar-besaran di Kalimantan Selatan pada komoditas bawang merah, sehingga terjadi banyak gagal panen.
2. Terjadinya alih pemanfaatan fungsi lahan di Kalimantan Selatan terutama dari petani sawah menjadi petani pekebun karet dan kelapa sawit dengan memanfaatkan lahan untuk dijadikan komoditas tanaman yang cepat menghasilkan nilai ekonomis/nilai tambah bagi para petani.
3. Curah hujan yang tinggi di tahun 2024 menyebabkan tanah menjadi lembab, sehingga bawang merah mudah terserang penyakit.

3. Solusi

1. Melakukan pengenalan organisme penyakit tanaman daerah yang sangat rawan diserang hama penyakit tanaman dengan pengendalian serentak/bersamaan.
2. Melakukan pengendalian oleh para penyuluh pertanian di Kabupaten dan Kota kepada para petani tentang keberadaan manfaat Lahan Pangan Berkelanjutan kepada para petani padi (Sawah).
3. Melakukan/melaksanakan pelatihan berupa Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SL PHT) kepada petani bawang.

4. Rencana Aksi

1. Melalui pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk segera memohonkan usulan bantuan terutama untuk benih bawang merah kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia kepada lahan berdampak serangan hama penyakit, karena modal yang paling besar dalam budidaya bawang merah adalah untuk pembelian benih bawang merah.
2. Memberikan bantuan modal/stimulus berupa bantuan sarana produksi pertanian yang lebih diprioritaskan kepada pemilik lahan untuk petani (sawah) bawang merah.
3. Melakukan pengaturan jadwal tanam bawang merah yang disesuaikan dengan musim, sehingga bisa meminimalkan potensi serangan hama dan penyakit tanaman.

Dari tabel data produksi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, 2023 dan 2024 diatas komoditas yang mengalami penurunan produksi berupa komoditas bawang merah yang secara langsung tentu akan berdampak pada penurunan produksi untuk Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.

Sedangkan untuk komoditas lainnya padi, jagung, cabe, karet dan sawit di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, 2023 dan 2024 telah mengalami peningkatan produksi dari tahun ketahun, tentu akan berdampak pada peningkatan produksi untuk Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data produksi pembandingan dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Tanah Laut, tingkat kenaikan produksi terjadi pada semua enam/6 komoditas padi, jagung, Cabe, Bawang Merah, Karet dan Sawit di Kabupaten Tanah Laut terjadi salah satunya karena adanya program Catur Cita Pembangunan Pertanian, yang tujuan utamanya adalah peningkatan produksi pertanian.

Sedangkan untuk Produksi Pertanian di Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dan 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Data Produksi Komoditas Pertanian Kab. Tanah Laut Tahun
2022, 2023 dan 2024

No	Komoditas	Realisasi Produksi (ton)			KenaikanProduksi (ton)		PenurunanProduksi (ton)	
		2022	2023	2024	2022-2023	2023-2024	2022-2023	2023-2024
1	Padi	143.962	147.410	169.270	3.448,06	21.859,94	-	-
2	Jagung	122.835	123.060	123.739	225	679	-	-
3	Cabe	2.350,9	2.786,33	2.857,00	435,43	70,67	-	-
4	Bawang Merah	11,0	111,48	120	100,48	8,52	-	-
5	Karet	14.601,7	19.699,9	21.354	5.098,20	1.654,10	-	-
6	Kelapa Sawit	50.865,7	73.229,7	75.235	22.344	2.005,30	-	-
	Jumlah	334.626,3	363.511,08	392.575,00	31.651,17	26.277,53	-	-

Sumber Data : Distanhorbun Tanah Laut 2024

Untuk mengetahui tingkat capaian hasil produksi di Kabupaten Tanah Laut maka dapat dilihat pada tabel diatas pada tahun 2023 dibanding 2024 apakah produksipertanian mengalami peningkatan / penurunan.

1. Analisa

1. Peningkatan produksi pada komoditas padi pada tahun 2024 disebabkan adanya Program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) seluas 16.541 ha, dan adanya Program Tala Bungas (Tanah Laut Lumbung Beras), yaitu berupa kegiatan dalam upaya peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) dan Intensifikasi (penggunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), program ini diperkuat dengan Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Produksi Padi, sebab yang ketiga adanya Program Gernas (Gerakan Nasional) percepatan tanam, yaitu gerakan untuk mengatur jadwal tanam yang meyesuaikan dengan keadaan iklim/cuaca, sehingga tanaman padi bisa terpenuhi kebutuhan air nya dan tidak mengalami kekeringan ataupun bisa bertahan apabila terjadi banjir, dan adanya bantuan sarana produksi dari Kementrian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi.
2. Pada tanaman Jagung, kenaikan produksi pada tahun 2024 dilakukan dengan cara intensifikasi, karena banyaknya alih fungsi lahan tamanan jagung ke sawit, cara intesnifikasi yaitu perubahan penggunaan benih oleh para petani jagung, dari yang sebelumnya petani menggunakan benih non unggul/lokal sekarang beralih menggunakan benih hibrida/unggul yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi, dengan rata-rata produtivitas 7,7 ton/ha, dan adanya bantuan sarana produksi dari kementrian pertanian dan Dinas Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan berupa benih, pupuk dan pestisida.

3. Peningkatan produksi cabe di tahun 2024 sebesar 70,67 ton, dikarenakan adanya program peningkatan produksi cabe yang salah satu tujuannya untuk pengendalian Inflasi, yang berasal dari dana APBN, APBD I dan APBD II, yang kegiatannya berupa bantuan bibit cabe sebanyak 1.800 bibit cabe dari kegiatan Turdes Insting (Turun ke Desa Menekan Infalasi dan Stanting), kegiatan Insentif Fiskal bantuan bibit cabe sebanyak 36 ha untuk 18 kelompok tani, dan bantuan bibit cabe besar untuk 10 kelompok tani sebanyak 10 ha, dan pada tahun 2024 harga jual cabe cukup bagus sehingga menarik minat para petani untuk menanam cabe.
4. Tanaman bawang merah juga mengalami kenaikan produksi yang disebabkan adanya bantuan pengembangan bawang merah seluas 13 ha dari Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan untuk 13 kelompok tani dan bantuan bibit bawang merah dari kegiatan Insentif Fiskal sebanyak 2 ha untuk 4 kelompok tani, dan peningkatan produksi bawang merah juga disebabkan adanya Program Tala Sumringah (Tanah Laut Sentra Bawang Merah), berupa kegiatan untuk meningkatkan produksi bawang merah dengan cara Ekstensifikasi (penambahan luas area tanam melalui pola Kemitraan (Grosir) dengan luas areal minimal 1 ha dan Pola Swadaya Pemberdayaan Petani (eceran) dengan luas area kecil/0,25 ha, kenaikan produksi bawang merah juga disebabkan adanya bantuan sarana produksi dari Kementerian Pertanian berupa sarana produksi.
5. Kenaikan produksi pada tanaman karet sebesar 1.654,10 ton dibanding tahun 2023 terjadi karena peningkatan luas tanam karet sebanyak 253 ha pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan adanya Program Tala Barasih (Tanah Laut Bokar Bersih) yaitu kegiatan pemberdayaan petani berupa pembentukan kelompok Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) pada petani Karet, yang tujuannya untuk meningkatkan produksi karet dan kesejahteraan para petani karet, dengan terbentuknya kelompok UPPB maka hasil karet mempunyai kualitas yang baik (tanpa ada campuran) sehingga nilai jualnya mengalami kenaikan, kenaikan produksi karet juga dikarenakan adanya bantuan sarana produksi baik dari Kementerian Pertanian, Provinsi maupun Kabupaten, berupa pupuk organik cair, benih maupun pestisida.
6. Produksi tanaman sawit yang meningkat pada tahun 2024 sebesar 2.005,30 ton, yang disebabkan adanya penambahan luas area produksi pada Tanaman Menghasilkan (TM) sawit sebanyak 325 ha pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, adanya bantuan pupuk dari anggaran APBD II, dan harga jual sawit pada tahun 2024 cukup bagus sehingga menarik petani untuk menanam sawit.

2. Kendala

1. Terbatasnya Jumlah Penyuluh Pertanian, yang saat ini hanya ada 84 PPL untuk melayani 135 desa, yang idealnya 1 desa 1 penyuluh, sehingga kekurangan sebanyak 51 Penyuluh Pertanian/PPL.
2. Terbatasnya alokasi pupuk subsidi hanya untuk 9/sembilan komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kakao, tebu dan kopi).
3. Kabupaten Tanah Laut tidak mempunyai Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), yang tugasnya adalah mengantisipasi, mengatasi serangan hama dan penyakit tanaman.
4. Adanya Dampak Perubahan Iklim yang berpotensi adanya acaman serangan hama penyakit tanaman pada komoditas pertanian.
5. Adanya alih fungsi lahan terutama untuk dataran tinggi yang berdampak kepada luas tanam akan berkurang
6. Kurangnya sarana dan alat mesin pertanian yang diperlukan oleh petani.

2. Solusi

1. Mengajukan usulan penambahan jumlah Penyuluh Pertanian/ PPL untukantisipasi kekurangan Penyuluh Pertanian/PPL.
2. Mengajukan usulan penambahan alokasi pupuk subsidi untuk komoditas unggulan daerah seperti pepweya, labu, karet dan kelapa sawit kepada Kementerian Pertanian.
3. Pengrekrutan pegawai baru sebagai Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT).
4. Melakukan pencegahan terjadinya serangan hama dan penyakit tanaman melalui SLPTT (sekolah lapang pengendalian hama terpadu).
5. Pembuatan Peraturan Daerah/Perda untuk melindungi lahan-lahan pertanian yang produktif.
6. Dukungan alat mesin pertanian dan sarana produksi pertanian merupakan hal yang penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah melalui Brigade Alsintan secara gratis.

3 Rencana Aksi

1. Pengrekrutan Petugas Penyuluh Swadaya (PPS) sebagai solusi jangka pendek.
2. Melanjutkan Inovasi Pompera (Pupuk Organik Mandiri Petani Sejahtera), yaitu kegiatan pupuk organik dengan memanfaatkan kotoran hewan yang ada di sekitar lingkungan petani untuk dijadikan pupuk organik sebagai pengganti terbatasnya aloaksi pupuk subsidi.

3. Memanfaatkan dan memanximalkan petugas POPT yang ada di Provinsi.
4. Melakukan penjadwalan pertemuan secara terus menerus kepada para penyuluh pertanian dan para kelompok tani / petani untuk penanganan Organisme Penganggu Tanaman.
5. Memberikan stimulus kepada para petani padi berupa sarana produksi pertanian berupa benih, bea siswa dan lain-lain yang lahan pertaniannya masih bertahan dan memberlakukan LP2B
6. Penyediaan alat mesin pertanian dan sarana produksi lainnya untuk mendukung kegiatan pertanian

1. Sasaran Eselon III

Dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan dalam rangka membantu kepala Dinas dalam pencapaian sasaran strategis yang dituangkan pelaksanaan program dan kegiatan. Maka peran eselon III sangat diharapkan keberadaanya dalam melaksanakan tanggung jawab pencapaian Misi tersebut melalui penguatan penguatan program yang dilaksanakan.

2. Capaian IKU Esselon III (Kabid)

Adapun sasaran strategis yang dilaksanakan oleh eselon III dalam mewujudkan program dinas adalah :

Tabel. Sasaran Strategis Eselon III
Bidang Tanaman Pangan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Luas Tanam Tanaman Pangan	86.618	59.705	68,93	56.707	52.180	92,02	56.707	61.960	109,26
		Padi	60.037	36.639	61,03	36.169	35.895	99,24	36.169	45.562	125,97
		Jagung	26.530	20.740	78,18	20.538	16.285	79,29	20.538	16.398	79,84
		Luas Panen Tanaman Pangan	83.511	50.239	60,16	56,52	49.155	86.966	56.522	59.809	105,82
		Padi	58.282	28.882	49,56	36,025	32.747	90.901	36.025	43.739	121,41
		Jagung	25.180	20.014	79,48	20,497	16.408	80.051	20.497	16.070	78

1. Analisa

1. Kenaikan luas area tanam dan panen padi pada tahun 2024 disebabkan karena adanya program Optimalisasi Lahan Rawa (Opla) dari Kementrian Pertanian sebanyak 16.541 ha, dan adanya program Tala Bungas (Tanah Laut Lumbung Beras) yaitu Tanah Laut Lumbung Beras, berupa kegiatan dalam upaya

peningkatan produksi padi/beras dengan cara Ekstensifikasi (peningkatan indeks pertanaman) dan Intensifikasi (penggunaan benih unggul dan benih lokal umur pendek), tidak adanya kekeringan/kemarau lama sehingga kegiatan Gernas (Gerakan Nasional) percepatan tanam bisa dilaksanakan.

2. Luas area panen jagung tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 338 ha dibandingkan tahun 2023, hal ini disebabkan adanya penurunan pada luas area tanam jagungnya yang menyebabkan juga penurunan pada luas panen jagung pada tahun 2024, dan adanya penurunan hasil panen secara manual bukan dengan cara mekanis (menggunakan combine/alat panen jagung). Walaupun luas panen jagung mengalami penurunan, tapi produktivitas jagung mengalami kenaikan sebesar 0,2 ton/ha dibandingkan tahun 2023, produktivitas jagung tahun 2023 sebesar 7,7 ton/ha, sedangkan produktivitas jagung tahun 2024 sebesar 7,7 ton/ha, hal ini diakibatkan adanya penggunaan benih hibrida/unggul dan tanaman jagung.

2. Kendala

1. Adanya perbedaan data Luas Lahan Baku Sawah (LBS)
2. Adanya alih fungsi lahan, dari komoditas tanaman pangan ke komoditas perkebunan dan hortikultura.
3. Harga jual jagung yang rendah, sehingga petani beralih ke komoditas lainnya.
4. Dampak perubahan iklim sehingga sebagian petani memilih untuk tidak menanam tanaman jagung.
5. Terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi kepada petani (maksimal 2 ha/ petani) tidak mendapatkan pupuk subsidi.

3. Solusi

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (ATR BPN dan BPS) untuk persamaan persepsi mengenai metode yang digunakan dalam menghitung/menentukan Luas Lahan Baku Sawah (LBS).
2. Memberikan rekomendasi berupa reward/penghargaan kepada petani yang masih mempertahankan luas tanam/masih bersedia melakukan budidaya tanaman pangan utama (padi dan jagung).
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penetapan harga jual jagung, sehingga petani tidak mengalami kerugian dan tetap melakukan budidaya/tanam jagung.
4. Membuat sistem peringatan dini dalam menghadapi Dampak Perubahan Iklim (DPI), sehingga petani tidak mengalami kegagalan tanam dan panen.
5. Memberikan pelatihan kepada petani untuk membuat pupuk secara mandiri dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar lingkungan.

4. Rencana Aksi

1. Memberikan stimulus kepada para petani berupa sarana produksi pertanian sebagai reward dalam mempertahankan keberadaan lahan pertaniannya.
2. Dukungan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan benih padi dan jagung yang berkualitas dan tahan terhadap hama penyakit dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
3. Pengadaan bantuan berupa benih sangat diharapkan berkelanjutan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta dukungan pembiayaan terkait dengan bantuan benih dan kegiatan pendukung yang teranggarkan pembiayaan pada APBD Kabupaten Tanah Laut
4. Melakukan agenda penjadwalan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dan para petani terkait pelaksanaan pertemuan, sosialisasi dan lain-lain.
5. Berupaya untuk mengusulkan bantuan benih jagung yang berkualitas kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
6. Berupaya untuk mengusulkan tambahan kuota pupuk bersubsidi kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Photo-Photo Rencana Aksi Kegiatan Dilapangan :



Pertemuan ke 4 SLPTT Padi Hibrida di ds Sarikandi kec. Kurau
24 Jun 2024 15.05.22



**Tabel. Sasaran Strategis Eselon III
Bidang Hortikultura**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Target (ha)	Realisasi (ha)	%
1	Meningkatnya Luasan Tanaman Hortikultura	Persentase luas tanam tanaman hortikultura :	26.400	28.975	10.975	305	1.255	411	305	1.255	411
		cabe	180	19.950	11.083	270	1.208,76	448	270	1.208,76	448
		Bawang Merah	4	4	10.000	35	46,20	132	35	46,20	132
		Persentase luas panen tanaman hortikultura :	34.200	35.200	10.292	360	877,70	244	350	878	251
		cabe	250	256	10.250	325	855,75	263	325	855,75	263
		Bawang Merah	2	2	10.000	35	21,95	63	25	21,95	88
2	Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hias	Tanaman Hias Anggrek (Jenis)	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100

1. Analisa

1. Realisasi luas tanam komoditas cabe yang melebihi target di tahun 2024 sebesar 411 %, hal ini disebabkan adanya program Insentif Fiskal untuk mengurangi Inflasi dan adanya penambahan area tanam cabe yang dibiayai oleh APBN dan APBD I, dan harga jual cabe yang tinggi/bagus di tahun 2024 memberikan daya tarik bagi petani untuk melakukan budidaya/tanam cabe.
2. Pada komoditas bawang merah, realisasi tanamnya juga melebihi target sebesar 132 %, sama dengan peningkatan produksi cabe, program Insentif fiskal sangat membantu dalam peningkatan produksi bawang merah dan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dengan berkerjasama (MoU) dengan Kabupaten Probolinggo (sentra bawang merah di Jawa Timur) untuk melakukan studi tiru atau pembelajaran mengenai budidaya bawang merah yang lebih baik, dan adanya fasilitas melalui pinjam pakai di Brigade Alsintan kepada petani bawang, sehingga petani bisa mengurangi biaya produksinya dalam mengolah tanah.
3. Realisasi panen cabe yang melebihi target sebesar 263% yang dikarenakan adanya kenaikan luas area tanam cabe yang juga melebihi target.
4. Komoditas bawang merah realisasi panennya tidak memenuhi target (88%), hal ini dikarenakan adanya serangan penyakit muler dan curah hujan yang tinggi, akan tetapi dengan menggunakan benih unggul produktivitas bawang merah di Kabupaten Tanah Lat mengalami kenaikan, dengan rata-rata kenaikan produktivitas sebesar 3 ton/ha.

5. sedangkan untuk realisasi pengembangan tanaman hias juga sesuai dengan target yaitu 1 jenis (100%), pengembangan tanaman hias hanya bisa 1 jenis disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang seharusnya bisa lebih dari 1 jenis tanaman hias yang dikembangkan jika didukung dengan anggaran yang tersedia.
2. Kendala
 1. Pencapaian target untuk luas panen komoditas bawang merah yang tidak memenuhi target, hal ini disebabkan adanya Dampak Perubahan Iklim berupa curah hujan yang tinggi pada awal tahun 2024, sehingga tanaman bawang terserang penyakit Muller (busuk daun).
 2. Tanaman hias anggrek untuk dibudidayakan memerlukan iklim, suhu dan perlakuan yang sangat khusus diperlukan untuk beradaptasinya
 3. Minat petani terhadap pengembangan budidaya bawang merah masih sangat rendah, karena perawatannya yang sangat intens.
 4. Budidaya pengembangan bawang merah memerlukan biaya operasional yang besar dari proses tanam sampai dengan panen (80 juta/ ha).
 3. Solusi
 1. Pengaturan jadwal tanam bawang merah, sehingga komoditas tidak mengalami kelebihan dan kekurangan air.
 2. Melakukan Indek pertanaman pada komoditas Anggrek dan pengaturan jadwal pola tanam yang sesuai dengan potensi komoditas.
 3. Memotivasi petani agar selalu nantinya berminat untuk menanam bawang merah.
 4. Melakukan dukungan swadaya dari petani bawang merah yang mempunyai modal yang besar untuk membantu petani bawang dengan modal yang kecil..
 4. Rencana Aksi
 1. Dukungan pengadaan benih secara berkelanjutan terutama untuk komoditas cabe dan bawang merah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
 2. Diperlukan tenaga ahli yang profesional dalam pengembangan budidaya anggrek
 3. Melakukan bimbingan teknis terutama kepada petani bawang merah
 4. Menerapkan Program Tala Sumringah (Tanah Laut Sentra Bawang Merah) dengan sistem pola Kemitraan/Grosir luasan lahan budidaya minimal 1 ha dan pola Pemberdayaan petani/eceran dengan luas lahan budidaya bawang merah 0,25 ha, adanya dukungan bantuan benih bawang merah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara berkelanjutan sharing APBD daerah pengadaan bantuan benih bawang merah.

Photo-Photo Rencana Aksi Kegiatan Dilapangan





**Tabel. Sasaran Strategis Eselon III
Bidang Perkebunan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Target (ha)	Realisasi (ha)	%	Target (ha)	Realisasi (ha)	%
1	Meningkatnya Luasan Areal Tanaman Perkebunan	Luas tanam tanaman Perkebunan	28,540	28,793	10.089	27.530	27.544	100	520	578	111
		Karet	15,900	16,015	10.072	14.897	14.852	100	300	325	108
		Sawit	12,500	12,634	10.107	12.633	12.691,6	100	220	253	115
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Yang Dipasarkan (ton)	59,650	65,625	11.002	66.607,72	92.929,60	140	68.102,51	96.589,00	142
		Karet	13,500	14,602	10.816	14.877,30	19.699,90	132	15.182,30	21.354,00	141
		Sawit	46,000	50,866	11.058	51.730,42	73.229,70	142	52.920,21	75.235,00	142
3	Meningkatnya Pemasaran hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi hasil tanaman perkebunan yang dipasarkan									
		Karet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sawit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Analisa

- Harga jual kelapa sawit yang relatif stabil/baik di tahun 2024, mengakibatkan adanya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan sawit, sehingga luas area tanam sawit pada tahun 2024 menjadi meningkat.
- Penambahan area tanam sawit juga sebagai akibat beralihnya petani dari komoditas pangan dan hortikultura ke komoditas perkebunan sawit, yang dinilai petani mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik daripada tanaman pangan, karena tanaman sawit merupakan tanaman tahunan sehingga tidak begitu repot dalam pemeliharaannya.
- Realisasi peningkatan produksi tanaman karet pada tahun 2024 dikarenakan adanya penambahan Tanaman Menghasilkan (TM) pada tanaman karet sebanyak 325 ha yang mengakibatkan adanya peningkatan produksi karet.
- Peningkatan produksi tanaman sawit juga disebabkan adanya penambahan Tanaman Menghasilkan (TM) tanaman sawit sebanyak 325 ha pada tahun 2024 yang berdampak pada peningkatan produksi.

5. Produksi hasil perkebunan yang dipasarkan/dijual untuk komoditas karet sama dengan jumlah hasil yang diproduksi (hasil yang diproduksi = hasil produksi yang dijual), karena hasil tanaman perkebunan karet tidak ada yang dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh petani, semua hasil produksi dipasarkan/dijual melalui kelompok UPBB (Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar).
6. Pada komoditas sawit perhitungan produksi hasil perkebunan yang dipasarkan/dijual sama dengan jumlah hasil yang diproduksi (hasil yang diproduksi = hasil produksi yang dijual), karena hasil tanaman perkebunan sawit juga tidak ada yang dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh petani, semua hasil produksi dipasarkan/dijual ke perusahaan.

2. Kendala

1. Adanya isu bahwa komoditas sawit adalah komoditas yang merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Populasi komoditas tanaman karet dan sawit rakyat yang ada di Kabupaten Tanah Laut saat ini usianya rata-rata sudah tua.
3. Biaya operasional pemeliharaan sawit dari proses tanam sampai dengan pembuahan cukup banyak dibandingkan dengan karet.
4. Luas tanam karet, sawit dan kopi selalu meningkat karena adanya alih pungs lahan.
5. Harga jual karet dan sawit sangat dipengaruhi oleh pasar global dunia.
6. Produksi tanaman unggulan karet, sawit dan kopi dari tahun ketahun meningkat tapi belum seimbang dengan upaya peremajaan karet, sawit, dan kopi yang dilakukan oleh petani.
7. Petani karet dan sawit swadaya (mandiri) yang melakukan penanaman tanpa fasilitas bantuan dari Pemerintah.

3. Solusi

1. Perlu penjelasan/penyuluhan kepada masyarakat bahwa komoditas sawit bukan komoditas yang merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Perlunya program peremajaan karet dan sawit rakyat untuk mengganti karet dan sawit yang tidak produktif dengan bibit unggul dan bersertifikat.
3. Dukungan bantuan modal swadaya dari petani sawit sangat diperlukan.
4. Melakukan pengendalian kepada para petani karet dan sawit yang dilaksanakan oleh penyuluh perkebunan mengenai manfaat dan keberadaan lahan perkebunan.

5. Para petani karet dan sawit yang difasiltasi oleh penyuluh perkebunan untuk tetap berupa menjaga keutuhan perkebunannya.
6. Para petani diharapkan dapat memahami tetang pentingnya peremajaan karet untuk dilakukan.
7. Upaya bantuan bibit dan saprodi perlu untuk diupayakan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam mendukung pengembangan karet dan sawit.

4. Rencana Aksi

1. Melakukan Kajian Ilimiah bekerjasama dengan Universitas/Lembaga Penelitian mengenai isu tanaman sawit merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Melakukan validasi data luas perkebunan karet yang sudah memasuki tahap peremajaan.
3. Perlu adanya stimulan fasilitasi bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi tanaman perkebunan.
4. Memberikan stimulan kepada para petani berupa sarana produksi pertanian.
5. Meningkatkan kualitas mutu produk perkebunan untuk mendongkrak harga jual di pabrik pengolahan, dengan menerapkan Program Tala Barasih (Tanah Laut Bokar Bersih).
6. Memberikan stimulus bantuan bibit , biaya operasional pembukaan lahan yang akan diremajakan melaui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
7. Kesesuaian lahan akan nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani

Photo-Photo Rencana Aksi Kegiatan Dilapangan





**Tabel. Sasaran Strategis Eselon III
Bidang PSP dan Penyuluhan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM Penyuluh yang bersertifikat profesi (Orang)	2	1	50,00	2	2	100	2	2	100
		Persentase Kelompok Tani yang Terampil (Orang)	1,700	1,120	66	1700	1435	84	1700	1700	100
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Alsintan sesuai yang dapat dimanfaatkan (Unit)	180	180	100	170	194	114	170	189	111
		Persentase Kelompok tani yang mendapat pupuk bersubsidi	15,695	15,695	100	21.000	21000	100	21.000	21.000	100
		Persentase Jalan Usaha Tani yang dapat dimanfaatkan (Unit)	12	12	100	4	4	100	4	4	100
		Persentase Jalan Produksi yang dapat dimanfaatkan (Unit)	6	6	100	38	38	100	38	38	100

1. Analisa

1. Dukungan anggaran yang memadai sehingga tercapainya target sumber daya manusia penyuluh yang berprestasi, sehingga penyuluh bisa mengikuti pelatihan/ bimtek yang diselenggarakan oleh Instansi terkait.
2. Pemberdayaan petani/kelompok tani tercapai targetnya menjadi terampil karena adanya kegiatan penyuluhan instan yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
3. Terpenuhi pelayanan pinjam pakai alsintan melalui Brigade Alsintan dikarenakan pelayanan pinjam pakai alsintan Gratis (tidak dipungut biaya) dan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur syarat dan ketentuan pinjam pakai alsintan.
4. Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi yang terarah dengan baik dengan lintas sektoral yang berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) yang menyebabkan presentase penyaluran pupuk subsidi bisa memenuhi target ditahun 2024.

5. Perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dan adanya dukungan anggaran menjadikan pengerjaan fisik Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 4 unit/ sesuai target bisa dilaksanakan.
6. Pembangunan Jalan Produksi (JP) sebanyak 38 unit yang didukung dengan anggaran dan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan dan adanya dukungan anggaran menjadikan pengerjaan fisiknya sesuai target bisa dilaksanakan.

2. Kendala

1. Kesiapan para penyuluh untuk naik jenjang jabatan sehingga mendapatkan sertifikat profesi diperlukan biaya dan keterampilan profesional yang khusus dibidang penyuluhan.
2. Keberadaan kelompok tani pada saat ini banyak punya kemampuan wawasan dan keterampilan yang memadai dari target yang dapat terealisasi sesuai harapan.
3. Ketersediaan alat mesin pertanian sangat terbatas jumlahnya sedang yang memanfaatkan para petani kelompok sangat banyak jumlah.
4. Ketersediaan bantuan pupuk bersubsidi untuk petani sangat dibatasi koatnya oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
5. Lokasi desa pembangunan Jalan Usaha Tani tidak sesuai dengan rencana awal dari yang ditetapkan semula.
6. Lokasi desa pembangunan Jalan Produksi tidak sesuai dengan rencana awal dari yang ditetapkan semula.

3. Solusi

1. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penyuluh yang berkualitas/bersertifikasi profesi.
2. Pendampingan kelompok tani perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, regenerasi pengurus kelompok tani yang sudah lansia diatas 60 tahun dan untuk regenerasi baru dari 25 sampai dengan 50 tahun, dengan menumbuhkan petani milenial.
3. Memberikan fasilitasi kepada kelompok mengenai keterbatasan alsintan yang dimiliki oleh Dinas dengan mengkondisikan skala prioritas wilayah dan kondisi lahan yang siap panen
4. Melakukan dukungan swadaya dari para petani untuk membeli pupuk nonsubsidi.
5. Melakukan investigasi oleh konsultan perencanaan bersama Dinas terhadap lokasi desa Jalan Usaha Tani yang akan dibangun .
6. Melakukan investigasi oleh konsultan perencanaan bersama Dinas terhadap lokasi desa Jalan Produksi yang akan dibangun.

4. Rencana Aksi

1. Peningkatan kinerja penyuluh pertanian dengan Inovasi “Laki Tangguh Ok” , yaitu (Laporan Kinerja Tenaga Penyuluh Pertanian Berbasis Open Kamera) merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian dengan cara mengupload foto open kamera bagi setiap penyuluh pertanian di wilayah/desa binaannya minimal 3 kali dalam seminggu sebagai bukti sudah melakukan kerja lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Melakukan peningkatan kelas kepada kelompok tani, perlu adanya pelatihan tentang manajemen kepada kelompok tani,
2. Melakukan usulan pengadaan alsintan melalui dukungan dana pusat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut .
3. Melakukan pembuatan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah koton binatang dan tanaman
4. Melakukan pengalihan lokasi desa pembangunan JUT dan JP untuk kelompok tani sesuai dengan jumlah yang tersedia dan kondisi lahan yang memadai.

Photo-Photo Rencana Aksi Kegiatan Dilapangan





Tabel. Sasaran Strategis
Eselon III Sekretaris

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi	B	BB	BB	B	BB	BB	B	A	A
2	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terkelolanya Administrasi Umpeg, Baik dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terkelolanya Administrasi Perencanaan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Terkelolanya administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase Sarana dan Prasaran Kantor yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Analisa

1. Capaian nilai Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi yang capaiannya melebihi target (A), dikarenakan adanya kerjasama/kekompakan yang terbangun baik antar pegawai di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, sehingga pemenuhan data yang diperlukan dalam pembuatan laporan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang memenuhi target didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, keberadaan sumber Daya Manusia yang mumpuni sebagai sebab pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan bisa memenuhi target, walaupun jumlah SDM masih kekurangan.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kantor dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan , sehingga sarana dan prasarana yang dibangun/dikelola bisa dimanfaatkan.

2. Kendala

1. Untuk pencapaian target nilai Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi yang lebih baik lagi, maka diperlukan konsistensi kinerja dinas yang memadai dengan pencapaian target out put dan out come yang jelas dan terukur.
2. Dalam memenuhi tuntutan reformasi dan birokrasi untuk pemenuhan pencapaian Good Governance tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi dan akuntabel yang harus dipenuhi dalam pencapaian kriteria target kinerja.
3. Terkelolanya administrasi umum kepegawaian, administrasi perencanaan dan administrasi keuangan diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai dan terampil
4. Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai akan sangat penting dalam menunjang tugas-tugas dan kelancaran pekerjaan pada lingkup dinas.

3. Solusi

1. Mewujudkan komitmen dan etos kerja aparatur Dinas dengan mengedepankan target indikator kinerja yang jelas dan terukur.dalam meraih pencapaian nilai RB dan nilai SAKIP.
2. Bersama Dengan mengedepankan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada publik yang dimulai dengan lingkungan internal.
3. Ketersediaanya sumber daya manusia yang terampil dengan penuh didekasi tanggungjawab terhadap tugas dan pekerjaan yang diembannya tanpa kecuali.
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia untuk dapat dimaksimalkan dalam memperlancar tugas-tugas pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur

4. Rencana Aksi

1. Melakukan komitmen kinerja bersama dilingkungan Distanhorbun dalam mencapai nilai Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi dengan target out put kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan atas pekerjaan yang dilakukan.
2. Memberikan fasilitasi kemudahan pelayanan publik dan mewujudkan target kinerja yang jelas terukur dalam segala lini.
3. Berupaya untuk mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian, perencanaan dan keuangan dengan rentang kendali sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Terpeliharanya sarana dan prasarana berupa inventarisasi asset untuk dapat termanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan dalam batasan waktu tertentu.

3. Sasaran Eselon IV

Tabel. Sasaran Strategis Eselon IV
Kasubbag Perencanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Renja dengan Renstra	Keselarasan sasaran Renja dengan Renstra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah	Presentase hasil Monev kinerja yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Distanhorbun	Presentase Dokumen Pelaporan Distanhorbun yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya kepatuhan Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	Presentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Analisa

1. Perumusan perencana dalam pembuatan laporannya dengan melibatkan bidang teknis terkait membuat dokumen perencanaan bisa selesai tepat waktu.
2. Keselarasan dokumen antara Renstra dan Renja pada tahun 2024 juga dapat dipenuhi, hal ini dapat dicapai karenan adanya konsistensi kegiatan pada tiap bidang.
3. Tambahan staf pelaksana (PTT) di bagian Perencanaan menyebabkan kualitas pengukuran kinerja bisa terpenuhi/sesuai target (100%) pada tahun 2024.
4. Dukungan anggaran yang cukup dan koordinasi yang baik dengan bidang teknis membuat dokumen pelaporan realisasinya sesuai target (100%).

5. Adanya komitmen pada setiap pegawai Distanhorbun, membuat kepatuhan menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dapat sesuai target.

2. Kendala

1. Pencapaian nilai komponen pada perumusan perencanaan di Distanhorbun Kabupaten Tanah Laut dilakukan secara berproses, sehingga memerlukan waktu untuk koordinasi
2. Keselarasan antara Renstra dan Renja yang telah dibuat dan ada kalanya berbenturan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat / lembaga Kementerian terhadap regulasi yang dibuat.
3. Dalam pengukuran kinerja kadang memerlukan waktu yang lama dalam proses penyesuaiannya terhadap produk aturan atau kebijakan yang dibuat.
4. Nilai Pelaporan diharapkan meningkat lagi di tahun depan, namun proses pencapaian tentu dibarengi dengan konsistensi kinerja SKPD tersebut dalam melaksanakan dan fungsinya.
- 5.

3. Solusi

1. perlu konsekwensi dan komitmen SKPD dalam memenuhi target capaian indikator kinerja pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, namun pencapaian dari komponen LKPJ dan SAKIP akan sangat didukung ketersediaan aparatur dalam memberikan data dukung
2. Jenis dan kualitas laporan yang disampaikan terakumulasi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tingkat kinerja yang dihasilkan.
3. Hal lain sumber dana pendukung kegiatan sangat diperlukan dalam strategis pencapaian kinerja dalam bentuk program dan kegiatan.
4. Sedangkan untuk dokumen kinerja terkait komponen SAKIP yang disusun merupakan rencana kerja SKPD yang harus dilaksanakan dari tahun ketahun hingga lima tahun kedepan yang diakomodir dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja lima tahunan kedalam Renstra.

4. Rencana Aksi

1. Pencapaian komponen perencanaan LKPJ dan SAKIP melalui sosialisasi bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah pada lingkup SKPD yang mewakili untuk dapat mengetahui komponen pengukuran yang jelas dan dilakukan secara transparansi.
2. Diupayakan adanya komitmen bersama dalam menentukan arah kebijakan

dalam merumuskan pencapaian nilai komponen secara sistematis dan jelas dalam mewujudkan kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.

3. Diupayakan setiap komponen LKPJ dan SAKIP yang telah dibuat oleh SKPD untuk segera dapat ditindaklanjuti secara mufakat.
4. Adanya kekurangan atau ketidaklengkapan data dukung dari bidang teknis atas komponen yang dihasilkan melalui tahapan kriteria agar kiranya dapat dipenuhi dengan baik dan benar.

Tabel. Sasaran Strategis Eselon IV

Kasubbag Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan administrasi keuangan dinas	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	42	42	100	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Laporan Keuangan	1	1	100	1	1	100	1	1	100
2	Meningkatnya penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran	Jumlah dokumen realisasi keuangan yg dilaporkan	12	12	100	12	12	100	12	12	100
		Jumlah dokumen realisasi SPJ yg dipertanggung jawabkan	1,200	1,166	97,17	2,500	2,500	100	2,500	2,500	100

1. Analisa

1. Jumlah usulan dokumen administrasi keuangan (4 dokumen) dan laporan keuangan (1 dokumen) realisasinya sesuai target pada tahun 2024, hal ini disebabkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bagian keuangan.
2. Adanya jadwal pembuatan laporan realisasi keuangan dan penerapannya sesuai dengan waktu, sehingga realisasinya memenuhi target.
3. Realisasi keuangan 91,01 %, dengan realisasi fisik sebesar 99%, hal ini membuat realisasi SPJ sebanyak 2.500 dokumen dapat mencapai target (100%).

2. Kendala

1. Realisasi SPJ yang menjadi kendala dari beberapa indikator tersebut adalah pencatatan transaksi keuangan masih dilakukan secara manual yang berdampak

pada laporan keuangan yang dibuat,

2. Perlunya dukungan data dalam membuat laporan keuangan dan SPJ yang akuntabel
3. Penyesuaian terhadap software penggunaan aplikasi aplikasi terbaru yang harus dilaksanakan dalam penyusunan laporan keuangan.

3. Solusi

1. Perlu adanya inovasi teknologi aplikasi lebih terkini dan lebih praktis pemanfaatannya dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
2. Keakurasian data dukung dalam membuat laporan keuangan dan SPJ sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban setiap yang ada di SKPD
3. Memperkenalkan produk hal yang baru terhadap pelaksanaan aplikasi penyusunan laporan keuangan

4. Rencana Aksi

1. Melakukan bimbingan teknis terkait dengan memanfaatkan aplikasi teknologi yang lebih terkini dan praktis dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis kinerja khususnya kepada aparatur pengelola keuangan secara simultan dan berkesinambungan,
2. Mengingat tingkat kompleksitas penyusunan keuangan kemungkinan akan mengalami restrukturisasi terkait dengan tuntutan keberadaan regulasi dan tata cara pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang harus sistematis maka diperlukan kedepan inovasi terbaru yang lebih praktis pemanfaatannya
3. Melakukan peningkatan kepada wawasan aparatur untuk lebih mengetahui terkait pelaksanaan aplikasi untuk lebih familier terhadap penggunaannya

**Tabel. Sasaran Strategis Eselon IV
Kasubbag Umpeg**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian IKU 2022			Capaian IKU 2023			Capaian IKU 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen persyaratan surat menyurat (Dokumen)	4	4	100	4	4	100	4	4	100
		Jumlah Administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib (Orang)	148	148	100	145	145	100	145	145	100
		Jumlah Asset inventarisasi yg dikelola (Unit)	4,173	4,173	100	4,173	4,173	100	4,173	4,173	100
		Jumlah Asset inventarisasi yg dikelola dan dihapuskan (Unit)	55	55	100	55	55	100	55	55	100

1. Analisa

1. Pembagian tugas yang tertib dibagian umum kepegawaian khususnya dibagian surat menyurat.
2. Adanya aplikasi Simponi mempermudah dalam pelayanan kepegawaian.
3. Dukungan anggaran yang memadai sehingga Diklat bagi pegawai bisa dilaksanakan.
4. Adanya staf pembantu petugas pengurus barang dalam mengelola dan menginventaris barang milik daerah (BMD).

2. Kendala

1. Kurang disiplinnya pegawai dalam memanfaatkan kebutuhan / keperluan dalam setiap pelaksanaan pengadministrasian baik berkaitan dengan surat menyurat, tata cara penulisan atau pun pencatatan hal-hal yang diperlukan dalam setiap pelaporan atau pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas.
2. Kendala lain sistem pencatatan atau pelaporan yang dibuat dalam agenda buku khusus akan sering mengalami kesalahan dalam pengadministrasian tidak dibuat pencatatan secara kronologis terurut sesuai dengan nomor urut dan pengkodefikasian.
3. Inventarisasi yg dikelola dan dihapuskan pada saat didistribusikan kepada pengguna oleh aparatur asset akan mengalami pergerakan, perpindahan atau mutasi ke tempat lain tanpa sepengetahuan petugas barang, sehingga

pada saat terjadi kerusakan atau tidak layak pakai bagi pengguna tidak melaporkan tepat pada waktunya.

4. Adanya penambahan nilai asset dikarenakan adanya belanja modal berupa penambahan asset diantaranya pembelian computer PC, Laptop, Printer dan lainnya, mengingat asset yang sudah rusak tidak termafaatkan lagi sehingga perlu untuk dihapuskan kembali.

3. Solusi

1. Menanamkan tingkat kesadaran aparatur para pengguna administrasi dan pencatatan administrasi surat menyurat, kepegawaian , inventarisasi asset yg dikelola atau dipergunakan dan dihapuskan, apapun jenisnya hendaknya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk teknis yang harus ditaati sehingga administrasi dapat dilakukan dengan baik. dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan penertiban kembali pencatatan administrasi surat, administrasi kepegawaian secara baik dan benar menurut ketentuan dan prosedur
3. Diharapkan asset yang tersedia dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga pemanfaatan umur ekonomis asset dapat lebih maksimal penggunaannya.
4. Aset yang sudah tercatat sebagai barang inventarisasi agar dikelola dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan.

4. Rencana Aksi

1. Melakukan bimbingan teknis bagi aparatur dalam hal tata cara penyusunan naskah dinas tertib administrasi surat menyurat, administrasi kepegawaian, pengkodefikasian kelompok terkait dengan inventarisasi barang milik daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola administrasi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk asset yang terhapuskan agar dikelola dan dicatat atau deregister secara kontinyu dengan baik dan segera untuk dilaporkan keberadaan asset tersebut mana yang rusak ringat, berat dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Akuntabilitas Keuangan

B.1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Anggaran dan realisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 61.108.137.157,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.615.224.851,-, atau sebesar 90,01% untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
3.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN	61.108.137.157,00	55.615.224.851,00	91,01	5.492.912.306,00
3.27.01	PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.127.642.672,00	24.973.980.121,00	92,06	2.153.662.551,00
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.475,00	19.999.200,00	100,00	275,00
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.682,00	9.999.600,00	100,00	82,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.999.682,00	9.999.600,00	100,00	82,00
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.793,00	9.999.600,00	100,00	193,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.999.793,00	9.999.600,00	100,00	193,00
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.979.898.913,00	21.025.050.523,00	91,49	1.954.848.390,00
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.969.900.043,00	21.015.051.723,00	91,49	1.954.848.320,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.805.522.394,00	6.563.891.353,00	96,45	241.631.041,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	817.643.500,00	752.290.478,00	92,01	65.353.022,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	690.328.515,00	570.797.969,00	82,68	119.530.546,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	69.476.400,00	57.667.352,00	83,00	11.809.048,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	202.318.500,00	175.000.000,00	86,50	27.318.500,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.169.247.077,00	996.140.000,00	85,19	173.107.077,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	125.193.600,00	116.640.000,00	93,17	8.553.600,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.093.600,00	32.130.000,00	89,02	3.963.600,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.594.400,00	185.000,00	3,31	5.409.400,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	414.152.744,00	304.164.000,00	73,44	109.988.744,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	57.166.128,00	42.945.060,00	75,12	14.221.068,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	942.807.754,00	915.041.038,00	97,05	27.766.716,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	20.320.000,00	-	-	20.320.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177.800,00	83.289,00	46,84	94.511,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	29.400,00	8.586,00	29,20	20.814,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	672.000.000,00	539.268.705,00	80,25	132.731.295,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	81.630.000,00	64.975.876,00	79,60	16.654.124,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.039.363,00	13.516.116,00	74,93	4.523.247,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.964.133,00	1.549.731,00	78,90	414.402,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	51.000.000,00	40.548.418,00	79,51	10.451.582,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.730.000,00	4.649.083,00	81,14	1.080.917,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.898.495,00	-	-	5.898.495,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	3.750.676,00	-	-	3.750.676,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.340.000.000,00	7.518.230.567,00	90,15	821.769.433,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	959.442.768,00	873.775.153,00	91,07	85.667.615,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.342.346.288,00	1.338.281.638,00	99,70	4.064.650,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	132.026.508,00	93.272.311,00	70,65	38.754.197,00
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.998.870,00	9.998.800,00	100,00	70,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	9.998.870,00	9.998.800,00	100,00	70,00
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.793.500,00	216.509.900,00	86,33	34.283.600,00
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.793.500,00	116.509.900,00	77,26	34.283.600,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	150.793.500,00	116.509.900,00	77,26	34.283.600,00
3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	-

3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.541.954.582,00	1.525.021.409,00	98,90	16.933.173,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.990.486,00	19.980.000,00	99,95	10.486,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	19.990.486,00	19.980.000,00	99,95	10.486,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.998.359,00	289.586.808,00	96,53	10.411.551,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	52.100.379,00	44.692.808,00	85,78	7.407.571,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	57.827.239,00	57.799.000,00	99,95	28.239,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	116.523.294,00	116.205.000,00	99,73	318.294,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	62.557.447,00	59.900.000,00	95,75	2.657.447,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.990.000,00	9.990.000,00	100,00	-
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.992.954,00	17.383.000,00	86,95	2.609.954,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.992.954,00	17.383.000,00	86,95	2.609.954,00
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.997.783,00	47.244.400,00	94,49	2.753.383,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	44.067.284,00	42.324.400,00	96,04	1.742.884,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	5.930.499,00	4.920.000,00	82,96	1.010.499,00
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33	500.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33	500.000,00
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	-
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.133.975.000,00	1.133.327.201,00	99,94	647.799,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.985.000,00	113.575.000,00	99,64	410.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	783.990.000,00	783.845.601,00	99,98	144.399,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	236.000.000,00	235.906.600,00	99,96	93.400,00
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183.006.270,00	167.809.000,00	91,70	15.197.270,00
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	99.893.712,00	85.885.000,00	85,98	14.008.712,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	99.893.712,00	85.885.000,00	85,98	14.008.712,00
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.112.558,00	81.924.000,00	98,57	1.188.558,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.414.405,00	25.400.000,00	99,94	14.405,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.298.153,00	13.224.000,00	99,44	74.153,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	33.300.000,00	33.300.000,00	100,00	-
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	11.100.000,00	10.000.000,00	90,09	1.100.000,00
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.656.329.932,00	1.535.357.410,00	92,70	120.972.522,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.500.000,00	286.864.258,00	79,80	72.635.742,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	546.488,00	60,72	353.512,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	14.000.000,00	9.834.400,00	70,25	4.165.600,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	194.600.000,00	136.511.599,00	70,15	58.088.401,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	50.000.000,00	42.016.111,00	84,03	7.983.889,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	97.955.660,00	97,96	2.044.340,00
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.295.329.932,00	1.248.493.152,00	96,38	46.836.780,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	480.000.000,00	444.000.000,00	92,50	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	78.900.000,00	78.900.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	336.000.000,00	336.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	312.000.000,00	312.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	78.960.000,00	71.696.352,00	90,80	7.263.648,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.306.512,00	2.620.800,00	60,86	1.685.712,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.163.420,00	3.276.000,00	63,45	1.887.420,00
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.660.000,00	484.232.679,00	97,69	11.427.321,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	-
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	285.300.000,00	285.197.679,00	99,96	102.321,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	171.900.000,00	171.816.911,00	99,95	83.089,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dir	113.400.000,00	113.380.768,00	99,98	19.232,00
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0121	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pend	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0405	Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	-
5.1.02.03.02.0409	Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer	9.100.000,00	9.100.000,00	100,00	-
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	110.360.000,00	99.035.000,00	89,74	11.325.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	110.360.000,00	99.035.000,00	89,74	11.325.000,00

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.184.187.846,00	2.799.130.450,00	87,91	385.057.396,00
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.872.769.526,00	2.515.534.886,00	87,56	357.234.640,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Kom	1.688.782.911,00	1.547.318.150,00	91,62	141.464.761,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	162.785.190,00	126.601.000,00	77,77	36.184.190,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	195.437.360,00	186.096.000,00	95,22	9.341.360,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	99.792.400,00	91.340.000,00	91,53	8.452.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	22.195.892,00	21.543.916,00	97,06	651.976,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.607.281,00	2.343.635,00	89,89	263.646,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.567.760,00	2.560.000,00	99,70	7.760,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	25.526.781,00	24.040.000,00	94,18	1.486.781,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	51.382.905,00	40.252.000,00	78,34	11.130.905,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.271.040,00	9.900.000,00	96,39	371.040,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.125.000,00	28.125.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.950.000,00	37.950.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	5.627.589,00	5.069.900,00	90,09	557.689,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	56.550.000,00	43.800.000,00	77,45	12.750.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.530.150,00	6.528.200,00	99,97	1.950,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.550.000,00	2.320.000,00	90,98	230.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.220.000,00	6.000.000,00	96,46	220.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208.960.000,00	167.672.499,00	80,24	41.287.501,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.920.000,00	110.495.000,00	99,62	425.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00	-
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah Dan Desa (TKDD)	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	-
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	169.233.563,00	151.131.000,00	89,30	18.102.563,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.183.986.615,00	968.216.736,00	81,78	215.769.879,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	19.596.403,00	14.301.636,00	72,98	5.294.767,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.811.340,00	4.415.250,00	91,77	396.090,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	42.574.050,00	38.100.000,00	89,49	4.474.050,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	18.019.840,00	12.770.000,00	70,87	5.249.840,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	165.600.000,00	165.300.000,00	99,82	300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.837.982,00	7.670.000,00	55,43	6.167.982,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	6.541.000,00	5.789.500,00	88,51	751.500,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11.100.000,00	8.000.000,00	72,07	3.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.530.000,00	74.965.350,00	77,66	21.564.650,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.650.000,00	107.605.000,00	99,96	45.000,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	629.370.000,00	461.000.000,00	73,25	168.370.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	16.206.000,00	16.150.000,00	99,65	56.000,00
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Org	311.418.320,00	283.595.564,00	91,07	27.822.756,00
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	44.995.320,00	39.356.364,00	87,47	5.638.956,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.275.320,00	3.136.364,00	73,36	1.138.956,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.820.000,00	9.820.000,00	100,00	-
3.27.02.2.02.04	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	266.423.000,00	244.239.200,00	91,67	22.183.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	105.000,00	105.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	17.000.000,00	12.750.000,00	75,00	4.250.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.290.000,00	62.780.200,00	94,71	3.509.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	560.000,00	540.000,00	96,43	20.000,00
5.2.03.01.01.0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium	182.468.000,00	168.064.000,00	92,11	14.404.000,00

3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24.770.446.312,00	22.368.038.500,00	90,30	2.402.407.812,00
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	5.249.108.124,00	4.388.098.516,00	83,60	861.009.608,00
3.27.03.2.01.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	221.149.510,00	99.263.836,00	44,89	121.885.674,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	2.997.836,00	99,93	2.164,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	4.569.510,00	4.136.000,00	90,51	433.510,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.800.000,00	19.800.000,00	39,76	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.650.000,00	3.600.000,00	77,42	1.050.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	71.596.500,00	-	-	71.596.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.533.500,00	62.730.000,00	83,05	12.803.500,00
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertan	4.687.983.714,00	4.042.253.680,00	86,23	645.730.034,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.804.929.025,00	3.484.900.000,00	91,59	320.029.025,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.734.800,00	31.250.000,00	49,81	31.484.800,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	364.058.060,00	165.375.000,00	45,43	198.683.060,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.811.829,00	3.209.600,00	84,20	602.229,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.650.000,00	16.650.000,00	64,91	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.000.000,00	17.250.000,00	63,89	9.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	50.600.000,00	45.450.000,00	89,82	5.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	15.000.000,00	66,67	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	47.000.000,00	19.200.000,00	40,85	27.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.360.000,00	103.355.000,00	100,00	5.000,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	72.000.000,00	59.851.080,00	83,13	12.148.920,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	104.340.000,00	80.763.000,00	77,40	23.577.000,00
3.27.03.2.01.16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan L	249.974.900,00	239.016.000,00	95,62	10.958.900,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.750.000,00	24.750.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	35.200.000,00	35.200.000,00	100,00	-
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesa	99.999.900,00	90.090.000,00	90,09	9.909.900,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Tel	50.000.000,00	48.951.000,00	97,90	1.049.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.025.000,00	40.025.000,00	100,00	-
3.27.03.2.01.17	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Perta	90.000.000,00	7.565.000,00	8,41	82.435.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.000.000,00	5.625.000,00	6,86	76.375.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	560.000,00	-	-	560.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	1.940.000,00	1.940.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.500.000,00	-	-	3.500.000,00
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	19.521.338.188,00	17.979.939.984,00	92,10	1.541.398.204,00
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	19.521.338.188,00	17.979.939.984,00	92,10	1.541.398.204,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.500.000,00	49.475.000,00	99,95	25.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi	30.000.000,00	29.667.000,00	98,89	333.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	261.815.999,00	233.010.000,00	89,00	28.805.999,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	93.650.000,00	93.075.000,00	99,39	575.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	1.505.500.000,00	1.295.190.000,00	86,03	210.310.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	17.580.872.189,00	16.279.522.984,00	92,60	1.301.349.205,00
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	916.415.418,00	788.949.280,00	86,09	127.466.138,00
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	916.415.418,00	788.949.280,00	86,09	127.466.138,00
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, I	542.734.862,00	456.786.978,00	84,16	85.947.884,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	321.929.770,00	240.550.364,00	74,72	81.379.406,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	499.536,00	489.600,00	98,01	9.936,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12.645.556,00	10.277.014,00	81,27	2.368.542,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	72.945.000,00	72.945.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	38.250.000,00	38.250.000,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.265.000,00	66.075.000,00	96,79	2.190.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	-
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura	373.680.556,00	332.162.302,00	88,89	41.518.254,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	39.347.200,00	30.877.202,00	78,47	8.469.998,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	310.333.356,00	279.285.100,00	90,00	31.048.256,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	22.000.000,00	91,67	2.000.000,00
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.090.589.784,00	2.831.687.200,00	91,62	258.902.584,00
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Ka	3.090.589.784,00	2.831.687.200,00	91,62	258.902.584,00
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perta	3.090.589.784,00	2.831.687.200,00	91,62	258.902.584,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.828.551.950,00	2.596.400.000,00	91,79	232.151.950,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8.507.834,00	4.027.200,00	47,34	4.480.634,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.750.000,00	29.250.000,00	68,42	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	3.500.000,00	1.400.000,00	40,00	2.100.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	5.000.000,00	2.500.000,00	50,00	2.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.030.000,00	71.260.000,00	98,93	770.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	84.000.000,00	82.600.000,00	98,33	1.400.000,00

3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.018.855.125,00	1.853.439.300,00	91,81	165.415.825,00
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.018.855.125,00	1.853.439.300,00	91,81	165.415.825,00
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	977.055.125,00	886.764.300,00	90,76	90.290.825,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	11.677.625,00	10.239.300,00	87,68	1.438.325,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	14.985.000,00	13.500.000,00	90,09	1.485.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	17.482.500,00	17.450.000,00	99,81	32.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	142.200.000,00	110.025.000,00	77,37	32.175.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	238.000.000,00	226.500.000,00	95,17	11.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.510.000,00	84.750.000,00	99,11	760.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	440.000.000,00	397.100.000,00	90,25	42.900.000,00
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.041.800.000,00	966.675.000,00	92,79	75.125.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	748.920,00	740.000,00	98,81	8.920,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	40.761.080,00	9.485.000,00	23,27	31.276.080,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.090.000,00	20.250.000,00	74,75	6.840.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	22.400.000,00	10.000.000,00	44,64	12.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	672.800.000,00	669.000.000,00	99,44	3.800.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000,00	3.600.000,00	80,00	900.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	7.000.000,00	6.790.000,00	97,00	210.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	12.500.000,00	-	-	12.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	254.000.000,00	246.810.000,00	97,17	7.190.000,00

B.2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran dan program pencapaian rencana strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai aspek pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Aspek inilah yang selanjutnya diselaraskan dengan rencana strategis yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut yang diakomodir dalam kegiatan belanja dalam upaya mewujudkan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan pagu anggaran adalah sebesar Rp. 61.108.137.157,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 55.615.224.851,-, atau sebesar 90,01%, dengan realisasi fisiknya sebesar 99%.

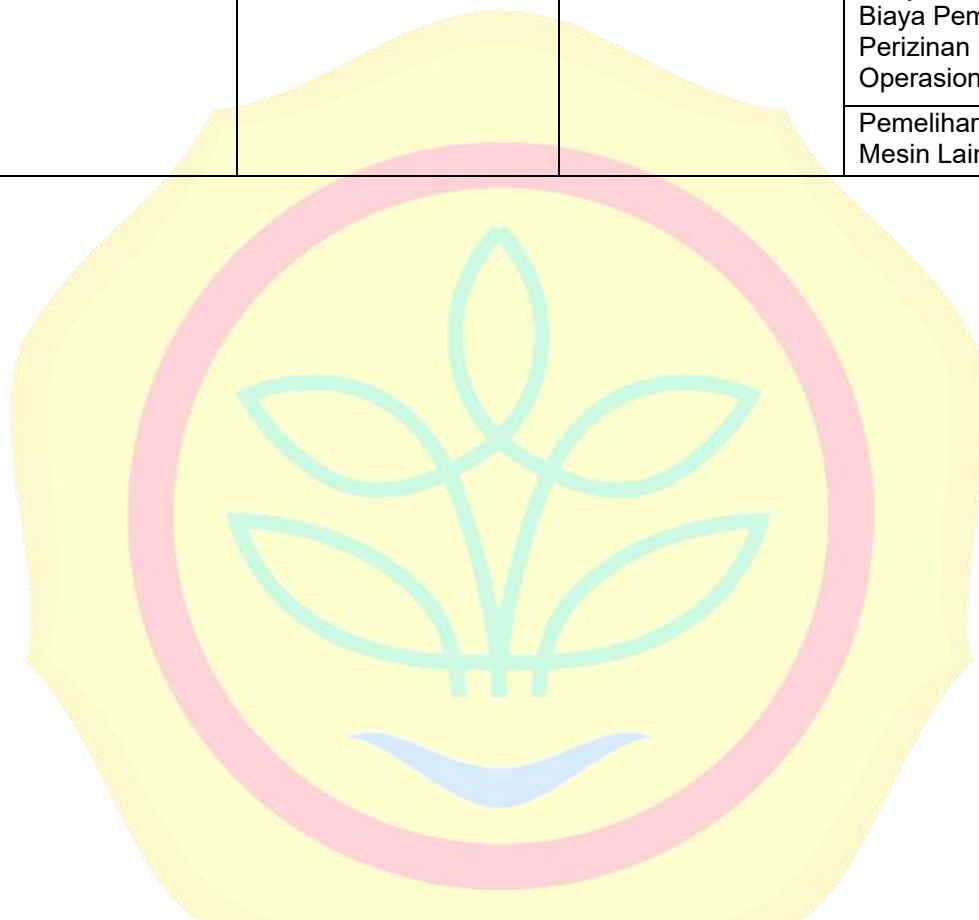
Tabel sasaran Program Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggran (RP)
Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.688.782.911,-
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.183.986.615,-
	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	19.521.338.188,-
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	221.149.510,-
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kp2B dan Lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	4.687.983.714,-
				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	249.974.900,-
				Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasana Pertanian	90.000.000,-

	Persentase luas area terdampak OPT dan DPI yang tertangani pada tanaman pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	542.734.862,-
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	373.680.556,-
	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	3.090.589.784,-
	Persentase penyuluh Pertanian yang terlatih	Penyuluh Pertanian	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	977.055.125,-
				Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Petanian	1.041.800.000,-
	Meningkatnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, dan akuntabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.682,-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.793,-

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.979.898.913,-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.998.870,-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	150.793.500,-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100.000.000,-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.990.486,-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.998.359,-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.992.954,-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.997.783,-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,-
				Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.133.975.000,-
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan mebel	99.893.712,-
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	83.112.558,-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	359.500.000,-
				Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,-

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.295.329.932,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,-
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	285.300.000,-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,-



B.3 Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Jumlah pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebanyak 6 program dan 11 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 24 dengan pagu sebesar Rp. 41.257.332.788,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.345.640.047,- atau 88,09 %.

Jumlah pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebanyak 6 program dan 11 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 24 dengan Anggaran 2024 sebesar Rp. 61.108.137.157,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.615.224.851,-, atau sebesar 90,01%.

Dari perbandingan pagu kegiatan dari tahun 2023 dengan 2024 tersebut ternyata tingkat pencapaian kinerja tahun 2024 lebih tinggi capaiannya, hal ini terbukti dengan capaian kinerja tahun 2024 persentaserealisasi kinerja sebesar 91,01% dibanding tahun 2023 sebesar 88,09 %, meningkat sekitar 2,92%.

Adapun realisasi Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2024 dibanding dengan realisasi belanja tahun 2023 akan terlihat tingkat realisasi kenaikan dan penurunan pada tabel dibawah ini :



1
2

Tabel Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran							
		Tahun 2023				Tahun 2024			
		Pagu	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)	Pagu	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran (Rp)
		Rp	Rp	%	Rp	Rp	Rp	%	Rp
3.27	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN	41.257.332.788	36.345.640.047	88,09	4.911.692.741	61.108.137.157	55.615.224.851	91,01	5.492.912.306
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.785.156.769	23.684.484.698	85,24	41 00 672.071	27.127.642.672	24.973.980.121	92,06	2.153.662.551
3.27.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	19.923.868	19.923.400	100	468	19.999.475	19.999.200	100	275
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.984.134	9.983.800	100	334	9.999.682	9.999.600	100	200
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.939.734	9.939.600	100	134	9.999.793	9.999.600	100	193
3.27.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	24.361.061.641	20.578.217.293	84,47	3.782.844.348	22.969.900.043	21.015.051.723	91,49	1.954.848.320
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.351.065.845	20.568.222.293	84,47	3.782.843.552	22.969.900.043	21.015.051.723	91,49	1.954.848.320
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.995.796	9.995.000	99,99	796	9.998.870	9.998.800	100	70

3

3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.161.991.102	1.134.495.415	97,63	27.495.687	1.541.954.582	1.525.021.409	98,90	16.933.173
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.174.904	20.109.416	86,77	3.065.488	19.990.486	19.980.000	99,95	10.486,00
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	93.209.655	81.073.860	86,98	12.135.795	299.998.359	289.586.808	96,53	10.411.551
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					19.992.954	17.383.000	86,95	2.609.954
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.210.963	14.560.130	75,79	4.650.833	49.997.783	47.244.400	94,49	2.753.383
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.300.580	38.781.800	87,54	5.518.780	3.000.000	2.500.000	83,33	500.000
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material					15.000.000	15.000.000	100	-
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	968.495.000	968.220.209	99,97	274.791	1.133.975.000	1.133.327.201	99,94	647.799
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					183.006.270	167.809.000	91,70	15.197.270
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					85.885.000	14.008.712	85,98	14.008.712
3.27.01.2.08.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					83.112.558	81.924.000	98,57	1.188.558
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.459.960.158	1.351.388.890	92,56	1.656.329.932	1.535.357.410	120.972.522	92,70	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.500.000	-	-	1.500.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					359.500.000	286.864.258	79,80	72.635.742
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.295.329.932	1.248.493.152	96,38	46.836.780

3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	682.320.000	502.209.700	73,60	180.110.300	495.660.000	484.232.679	97,69	11.427.321
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	34.897.300	99,71	102.700	35.000.000	35.000.000	100	-
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	601.500.000	422.539.400	70,25	178.960.600	285.300.000	285.197.679	99,96	102.321
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.820.000	44.773.000	99,71	1.047.000	65.000.000	65.000.000	100	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya					110.360.000	99.035.000	89,74	11.325.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	759.991.603	726.912.114	95,65	33.079.489	3.184.187.846	2.799.130.450	87,91	385.057.396
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	732.131.382	699.912.114	95,60	32.219.268	2.872.769.526	2.515.534.886	87,56	357.234.640
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	234.069.583	211.932.814	90,54	22.136.769	1.688.782.911	1.547.318.150	91,62	141.464.761
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	498.061.799	487.979.300	97,98	10.082.499	1.183.986.615	968.216.736	81,78	215.769.879
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.487.665.893	10.932.751.775	95,17	554.914.118	24.770.446.312	22.368.038.500	90,30	2.402.407.812
3.27.03.2.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	249.733.350	238.996.000	95,70	10.737.350	5.249.108.124	4.388.098.516	83,60	861.009.608
3.27.03.2.01.03	Koordinasi Dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	-	-	-	221.149.510	99.263.836	44,89	121.885.674
3.27.03.2.01.15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-	-	-	-	4.687.983.714	4.042.253.680	86,23	645.730.034
3.27.03.2.01.16	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	249.733.350	238.996.000	95,70	10.737.350	249.974.900	239.016.000	95,62	10.958.900
3.27.03.2.01.17	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-	-	-	-	90.000.000	7.565.000	8,41	82.435.000

3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	11.237.932.543	10.693.755.775	95,16	544.176.768	19.521.338.188	1.7979.939.984	92,10	1.541.398.204
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	11.237.932.543	10.693.755.775	95,16	544.176.768	19.521.338.188	1.7979.939.984	92,10	1.541.398.204
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	526.018.244	428.941.060	81,54	97.077.184	916.415.418	788.949.280	86,09	127.466.138
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	526.018.244	428.941.060	81,54	97.077.184	916.415.418	788.949.280	86,09	127.466.138
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	526.018.244	428.941.060	81,54	97.077.184	542.734.862	456.786.978	84,16	85.947.884
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	373.680.556	332.162.302	88,89	41.518.254
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	372.036.290	278.751.000	74,93	93.285.290	3.090.589.784	2.831.687.200	91,62	258.902.584
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	372.036.290	278.751.000	74,93	93.285.290	3.090.589.784	2.831.687.200	91,62	258.902.584
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-	-	-	-	3.090.589.784	2.831.687.200	91,62	258.902.584
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	372.036.290	278.751.000	74,93	93.285.290	-	-	-	-
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	326.463.989	293.799.400	89,99	32.664.589	2.018.855.125	1.853.439.300	91,81	165.415.825
3.27.07..2.01	Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	326.463.989	293.799.400	89,99	32.664.589	2.018.855.125	1.853.439.300	91,81	165.415.825
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	326.463.989	293.799.400	89,99	32.664.589	977.055.125	886.764.300	90,76	90.290.825
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	-	-	-	-	1.041.800.000	966.675.000	92,79	75.125.000

**Tabel : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 dan 2024**

Uraian	Anggran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2023			
BELANJA DAERAH	41.257.332.788	36.345.640.047	88,09
Belanja Operasi	36.465.085.726	31.900.093.158	87,48
Belanja pegawai	24.351.065.845	20.568.222.293	84,47
Belanja Barang dan Jasa	5.627.440.042	5.054.570.865	89,82
Belanja Hibah	6.486.579.839	6.277.300.000	96,77
Belanja /modal	4.792.247.062	4.445.546.889	92,77
Jumlah Program	6		
Jumlah Kegiatan	12		
Jumlah Subkegiatan	24		
2024			
BELANJA DAERAH	61.108.137.157	55.615.224.851	91,01
Belanja Operasi	40.183.467.251	36.482.745.207	90,79
Belanja pegawai	22.969.900.043	21.015.051.723	91,49
Belanja Barang dan Jasa	16.960.333.645	15.233.962.484	89,92
Belanja Hibah	253.233.563	233.731.000	92,30
Belanja Modal	20.924.669.906	19.132.479.644	91,44
Jumlah Program	6		
Jumlah Kegiatan	14		
Jumlah Subkegiatan	32		

B.4. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah menggunakan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DPA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Jumlah pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebanyak 6 program dan 14 kegiatan dengan sub kegiatan sebanyak 32, dengan pagu sebesar Rp. 61.108.137.157,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.615.224.851,- atau sebesar 91,01 % dengan capaian kinerja sebesar 281,62%, dengan semua target produksi 6/enam komoditas dapat tercapai sehingga dapat efisiensi sebesar 190,61 % pada tahun 2024.

Efisiensi terbesar ada pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, berupa kegiatan untuk peningkatan produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (padi, jagung, cabe dan bawang merah), dimana capaian kinerjanya sebesar 351,73 %, realisasi anggaran pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan sebesar 87,91% 99 %. sehingga didapatkan efisiensi sebesar 263,82 %.

Tingkat efisiensi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang sebagian besar merupakan kegiatan yang langsung berpengaruh pada capaian produksi pertanian, yang kegiatannya berupa bantuan benih, pupuk dan pelatihan kepada petani, dengan adanya bantuan benih lokal umur pendek atau benih unggul dan benih hibrida yang produktivitasnya lebih tinggi (6 ton/ha) petani bisa meningkatkan produksinya dengan cara intensifikasi (peningkatan produktivitas).

Sedangkan bantuan pupuk mengatasi keterbatas alokasi pupuk subsidi, dimana petani yang laus lahannya di atas 2 ha tidak boleh mendapatkan pupuk subsidi dan harga pupuk non subsidi yang mahal, tentunya hal ini sangat membantu petani dalam memenuhi sarana produksinya, dengan analisis efisiensinya sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Efisiensi
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	351,73	87,91	263,82
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	133,37	90,30	43,07
3.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	281,62	86,09	195,53
4.	Program Pemberian Izin Usaha Pertanian	141,41	91,62	49,79
5.	Program Penyuluhan Pertanian	281,62	91,81	189,81

Tingkat efisiensi pada program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sebesar 263,82%, hal ini menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak langsung pada peningkatan produksi pertanian dengan adanya bantuan sarana produksi (benih, pupuk, pestisida dan alsintan) kepada petani dengan pelaksanaan program Tala Bungas (Tanah Laut Lumbung Beras), Tala Sumringah (Tanah Laut Sentra Bawang Merah) dan Tala Barsih (Tanah Laut Bokar Bersih) sehingga target Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2024 ini bisa tercapai/memenuhi target produksi pada komoditas padi, jagung, cabe, bawang merah, karet dan sawit.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 s/d 2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi”, dengan kosep yang mempertimbangkan beberapa hal-hal sebagai berikut :

1. Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
3. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
4. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026;

Dari keempat hal tersebut didapatkan 3 aspek utama yang dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Pembangunan Pertanian termasuk ke dalam Aspek pembangunan Ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, yang merupakan aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi serta memberikan layanan-layanan pemenuhan infrastuktur yang berwawasan lingkungan. Aspek inilah yang selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Dengan konsep Rencana Pembangaunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 “Tanah Laut Berdaya Saing” yang mempunyai arti bahwa Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mempuyai nilai daya saing yang lebih baik, sehingga nilai jual produk pertanian Tanah Laut bisa lebih tinggi.

Peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan program kerja yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sesuai rencana strategis yang di turunkan dalam bentuk rencana kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan indikator Distanhorbun

Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebagai lembaga teknis secara umum telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 s/d 2026 yang disesuaikan dengan Isu Strategis dan Kondisi Pasca Pandemi, yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan mengintegrasikan kebijakan – kebijakan Nasional dan Regional dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perubahan paradigma perencanaan daerah dalam upaya mengarah pada upaya menciptakan *Good Governance*.

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada tahun 2024 dapat disimpulkan kategori sangat baik, dengan beberapa target produksi yang tercapai dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 s/d 2026 “Tanah Laut Berdaya Saing” yang mempunyai arti bahwa Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus mempunyai nilai daya saing yang lebih baik, sehingga nilai jual produk pertanian Tanah Laut bisa lebih tinggi.

Rata-rata capaian kinerja sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebesar 281,62%, dengan tercapainya semua target produksi 6/enam komoditas (padi, jagung, cabe, bawang merah, karet dan kelapa sawit), dengan rincinnya pada tabel berikut :

PRODUKSI KOMODITAS PERTANIAN TAHUN 2024				
No.	Komoditas	IKU / Target 2024	Produksi 2024	% Capaian Target
1	Padi	144.300,00	169.270,00	117,30
2	Jagung	123.136,00	123.739,00	100,49
3	Cabe	2.370,10	2.857,00	120,54
4	Bawang Merah	11,23	120,00	1068,57
5	Karet	15.182,30	21.354,00	140,65
6	Sawit	52.920,21	75.235,00	142,17
Total				1689,72
Rata-Rata				281,62
Satuan : Ton				

C. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam mewujudkan pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Tanah Laut dalam upaya meningkatkan produksi, perlu dukungan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk selalu terus memberikan bantuan sarana dan prasarana pertanian berupa mesin dan alat-alat pertanian berupa hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , dana DAK , APBD Provinsi yang dapat dimanfaatkan langsung bagi para petani. Dukungan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut terus berupa untuk selalu mengawal kepada para petani dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Tanah Laut dengan cara :

1. Mengupayakan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan usahatani, jalan produksi termasuk infrastruktur yang berhubungan dengan tata kelola air.

2. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pertanian termasuk didalamnya fasilitasi alat mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.
3. Fasilitasi untuk perolehan modal dengan lembaga Perbankan.
4. Meningkatkan kapasitas petani dan Sumber Daya Manusia Pertanian
5. Mengupayakan peningkatan tambah luas tanam dan pengolahan lahan pertanian sesuai dengan petunjuk teknis yang dilakukan oleh para penyuluh pertanian yang dilakukan untuk kepentingan petani.
6. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha serta penguatan kelembagaan tani.
7. Pelaksanaan tanam dilakukan dengan lebih memperhatikan jadwal tanam yang seharusnya.
8. Pada saat penanganan pasca panen diupayakan tepat waktu dan sasaran jangan sampai ada keterlambatan dalam pemanenan.
9. Mengoptimalkan aplikasi teknologi di tingkat petani.
10. Peran para penyuluh petani lapang untuk selalu terus dioptimalisasikan keberadaannya.

Kepala Dinas



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024

No.	Sasaran Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab / Sumber Data
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Persentase produksi pertanian : Padi, Jagung, Cabe, Bawang Merah, Kelapa Sawit, Karet .	$\sum \text{Produktivitas} \times \sum \text{Luas Panen}$	Kabid Tanaman Pangan, Kabid Hortikultura, Kabid Perkebunan.

Pelaihari, 07 Januari 2024

Kepala Dinas





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Syamsir Rahman
Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT



SYAMSIR RAHMAN

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Sekretaris

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 2000003 2 005

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Sekretaris
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator Kerja	Target
1	Meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nila Reformasi Birokrasi	B
2	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian Perencanaan dan Keuangan	Persentase Terkelolanya Administrasi Umum, Kepegawaian yang baik dan tepat waktu	100 %
		Persentase Terkelolanya Administrasi Perencanaan yang baik dan tepat waktu	100 %
		Persentase Terkelolanya Administrasi Keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %
3	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	100 %

No	Program	Anggaran
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Rp. 27.127.642.672

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Sekretaris



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 2000003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL. Jamaludin Malik, A.Pi
Jabatan : Kabid Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Hortikultura

AL. Jamaludin Malik, A.Pi
NIP. 19670804 199103 1 010

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kabid Hortikultura
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Luasan Tanaman Hortikultura	Persentase luas tanam tanaman hortikultura Cebe Bawang Merah	(100%) 270 ha 35 ha
		Persentase luas panen tanaman hortikultura Cebe Bawang Merah	(100%) 325 ha 35 ha
2	Meningkatnya Pengembangan Tanaman Hias	Persentase tanaman hias yang dikembangkan anggrek	(100%) 1 tanaman

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Rp. 1.688.782.911
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 1.183.986.615
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Rp. 266.423.000
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 542.734.862

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Hortikultura

AL. Jamaludin Malik, A.Pi
NIP. 19670804 199103 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarko, S.Pt
Jabatan : Plt Kabid Penyuluh & PSP

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

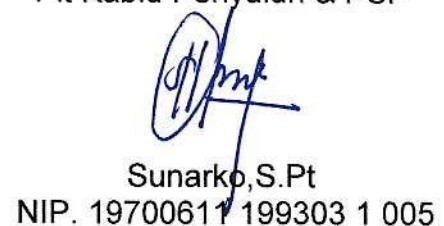
Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas


Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Plt Kabid Penyuluh & PSP


Sunarko, S.Pt
NIP. 19700611 199303 1 005

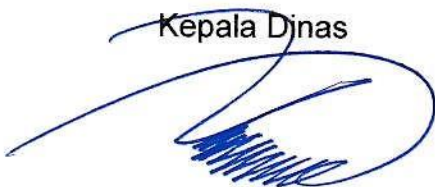
Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kabid Penyuluh & PSP
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM penyuluh yang bersertifikat profesi	2 Orang (100%)
		Persentase kelompok tani yang terampil	1.700 Kelompok (60%)
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase alsintan yang dapat dimanfaatkan	170 Buah (100%)
		Persentase kelompok tani yang memanfaatkan pupuk bersubsidi	21.000 orang (90%)
		Persentase jalan usaha tani yang dapat dimanfaatkan	4 Unit (100%)
		Persentase jalan produksi yang dapat dimanfaatkan	38 Unit (100%)

No	Program kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Rp. 1.688.782.911
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Rp. 249.974.900
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp. 19.521.338.188
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 542.734.862
5	Program Penyuluh Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.	Rp. 977.055.125

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Plt Kabid Penyuluh & PSP



Sunarko, S.Pt
NIP. 19700617 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edi Hariyadi, SP
Jabatan : Kabid Perkebunan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Perkebunan

Edi Hariyadi, SP
NIP. 19800512 200903 1 006

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kabid Perkebunan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Luasan Areal tanaman Perkebunan	luas tanam tanaman perkebunan : Karet Sawit	14.897 Ha 12.633 Ha
2	Meningkatnya Pemasaran hasil tanaman perkebunan	Persentase produksi hasil tanaman perkebunan yang dipasarkan	100%

No	Program Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	Rp. 1.688.782.911
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 1.183.986.615
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 542.734.862
4	Program Perizinan Usaha Pertanian Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Petanian	Rp. 3.090.589.784

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas


Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Perkebunan



Edi Hariyadi, SP
NIP. 19800512 200903 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Muhammad Fahrizal, SP
Jabatan : Kabid Tanaman Pangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. M. Faried Widyatmoko
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas

Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Tanaman Pangan

H. Muhammad Fahrizal, SP
NIP. 19810310 201001 1 027

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kabid Tanaman Pangan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Luas tanam tanaman pangan : Padi Jagung	36.169 ha 20.538 ha
		Luas panen tanaman pangan : Padi Jagung	36.025 ha 20.497 ha

No	Program/Sub Kegiatan	Anggaran
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 1.183.986.615

Pelaihari, 19 September 2024

Kepala Dinas



Ir. M. Faried Widyatmoko
NIP. 19680929 199503 1 006

Kabid Tanaman Pangan



H. Muhammad Fahrizal, SP
NIP. 19810310 201001 1 027



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto Prihatin, SP., M.P
Jabatan : Kasubag Perencanaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Perencanaan

Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kasubbag Perencanaan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Presentase Dokumen Perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Keselarasan dokumen Renja dengan Renstra	Keselarasas sasaran Renja dengan Renstra	100%
3	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah	Presentase hasil Monev kinerja yang ditindaklanjuti	100%
4	Meningkatnya Kualitas Dokumen pelaporan Distanhorbun	Presentase Dokumen Pelaporan Distanhorbun yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%
5	Meningkatnya kepatuhan Dalam menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	Presentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.999.682
2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 9.999.793

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubag Perencanaan



Supriyanto Prihatin, SP., M.P
NIP. 19850409 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jl. Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. 0512-21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari
Email : distanbun77@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulianti, S.Sos
Jabatan : Kasubbag keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Keuangan

Yulianti, S.Sos
NIP. 19740716 200701 2 012

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kasubbag Keuangan
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan administrasi keuangan dinas	Jumlah usulan dokumen administrasi keuangan	4 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen
2	Meningkatnya penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran	Jumlah dokumen realisasi keuangan yang dilaporkan	12 Dokumen
		Jumlah dokumen realisasi SPJ yang dipertanggung jawabkan	2,500 Berkas

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 22.969.900.043
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 9.998.870

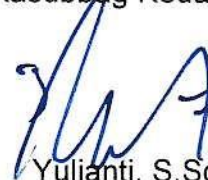
Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris



Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Keuangan



Yulianti, S.Sos
NIP. 19740716 200701 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elli Nuryanti, A.Md
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Leni Sari Indrawati, A.KS
Jabatan : Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Selanjutnya atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini ada mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris

Kasubbag Umum Kepegawaian

Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Elli Nuryanti, A.Md
NIP. 19861111 201001 2 017

Lampiran Perjanjian Kinerja tahun 2024
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Tanah Laut

No	Kinerja Utama	Indikator	Target
1	Meningkatnya perencanaan pengadaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumen persyaratan surat menyurat	4 Dokumen
		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani secara tertib	145 Orang
		jumlah asset inventaris yang dikelola	4.173 Unit
		jumlah asset inventaris yang dihapuskan	55 Unit

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 19.990.486
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp. 299.998.359
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 19.992.954
4	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 49.997.783
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 3.000.000
6	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.133.975.000
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 359.500.000
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Rp. 1.295.329.932
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 35.000.000
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 285.300.000
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.000.000

Pelaihari, 19 September 2024

Sekretaris



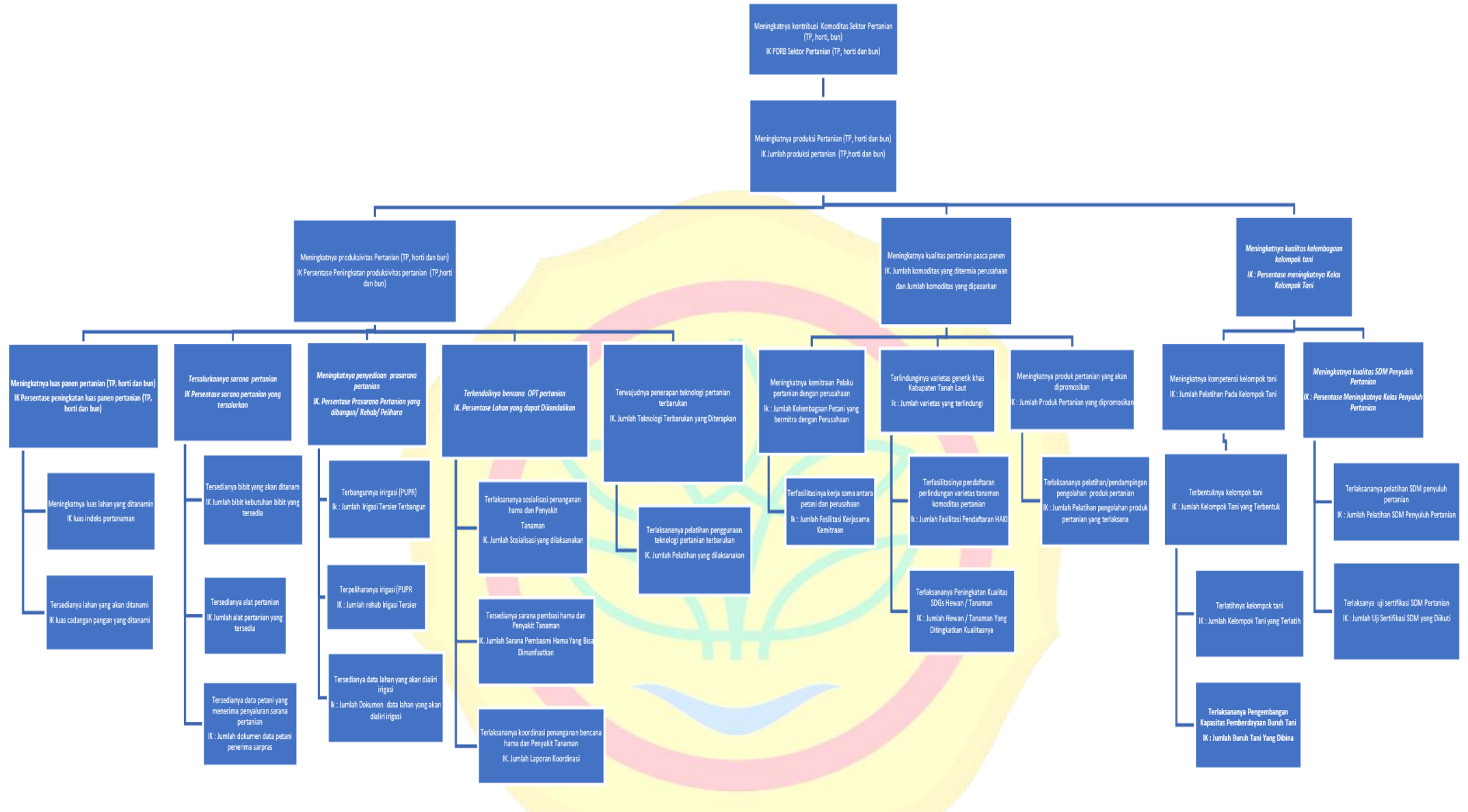
Leni Sari Indrawati, A.KS
NIP. 19761008 200003 2 005

Kasubbag Umum Kepegawaian



Elli Nuryanti, A.Md
NIP. 19861111 201001 2 017

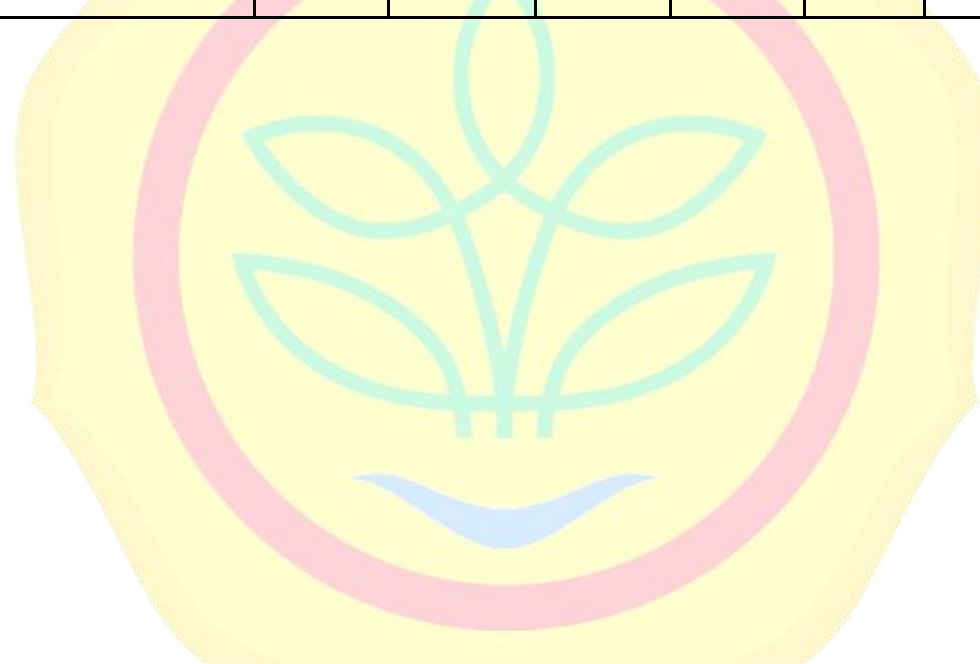
POHON KINERJA TAHUN 2024



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB.TANAH LAUT

1. Kepala Dinas

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023) (ton)	Target dan capaian Tahun 2024						Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
				Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian %		
1.	Meningkatnya Produksi Komoditas pertanian	2 Produksi Pertanian (ton) :									
		Padi	147.410,06	144.300,00	-	-	-	169.270,00	117,30	144.850	116,8%
		Jagung	123.060,00	123.136,00	-	-	-	123.739,00	100,49	123.305	100,35%
		Cabe	2.786,33	2.370,10	-	-	-	2.857,00	120,54	2.380,90	119,9%
		Bawang Merah	111,48	11,23	-	-	-	120,00	1.068,57	11,36	1.090,9%
		Keret	19.699,90	15.182,30	-	-	-	21.354,00	140,65	15.486,10	137,89%
		Sawit	73.229,70	52.920,21	-	-	-	75.235,00	142,17	56.109.80	134,08%



2. Sekretaris

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024					Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian %	
1.	Menirngkatkan penerapan tatakelola pemerintahan yang baik di SKPD	1	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	B	-	-	-	BB	BB	BB
2	Menirngkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	1	Nilai SAKIP	BB	A	-	-	-	A	A	A
		2	Persentase Terkelolanya Administrasi perencanaan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
		3	Persentase Terkelolanya Administrasi perencanaan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
		4	Persentase Terkelolanya Administrasi keuanganya yang baik dan tepat	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	1	Persentase Sarana dan Prasaran Kantor yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%

3. Kasubbag Perencanaan

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024					Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian %	
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan yang berkualitas	1	Nilai komponen perencanaan pada LKPJ Distanhorbun	B	B	-	-	-	B	B	B
		2	Nilai Perencanaan Komponen pada SAKIP Distanhorbun	BB	B	-	-	-	B	BB	BB
2	Meningkatnya penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel	1	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan	6 Dok	7 Dok	3 Dok	3 Dok	1 Dok	-	35 Dok	7 Dok
		2	Jumlah dokumen perencanaan program aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	6 Aplikasi	-	-	-	30 Aplikasi	6 Aplikasi

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024						Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian %		
1	Meningkatnya penyusunan perencanaan administrasi keuangan dinas	1	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	100%	4 Dok				4 Dok	100%	210 Dok	100%
		2	Jumlah laporan keuangan (Calk)	100%	1 Dok	-	-	-	1 Dok	100%	5 Dok	100%
2	Meningkatnya penyusunan pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran	1	Jumlah dokumen realisasi keuangan yg dilaporkan	100%	12 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	60 Dok	100%
		2	Jumlah dokumen realisasi SPJ yang dipertanggungjawabkan	97,17	2500 Spj	108 Spj	251 Spj	272 Spj	535 Spj	46,64	7.500 Spj	97,86

[illegible]

6. Kabid penyuluhan dan PSP

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024						Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian %		
1.	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	1	Persentase SDM Penyuluh yang bersertifikat profesi	50%	2	-	-	-	2	100	(100%) 12,5	100
		2	Persentase Kelompok Tani yang Trampil	66%	1.700	-	-	-	1.435	84,41	(100%) 1.700 Kelp.	84,41
2	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pertanian	1	Persentase Alsintan sesuai yang dapat dimanfaatkan	100%	180				194	107,7	(100%) 175 unit	107,7
		2	Persentas Kelompok tani yang mendapatkan pupuk bersubsidi	100%	21.000	-	-	-	21.000	100	(100%) 15.000 zak	100
		3	Persentase Jalan Usaha Tani yang dapat dimanfaatkan	100%	25	-	-	-	25	100	(100%) 25 unit	100
		4	Persentase Jalan Produksi yang dapat dimanfaatkan	100%	61				61	100	(100%) 61 unit	100

10. Kabid Perkebunan

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024						Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV	Capaian %		
1.	Meningkatnya Luasan Areal tanaman Perkebunan	1	Persentase luas tanam tanaman perkebunan	100,88%	27.530	-	-	-	27.544	100	28.540(100%)	100
			Karet	100,72	14.897	-	-	-	14.852	99,69	15,9	99,69
			Sawit	101,07	12.633	-	-	-	12.691,6	100,46	12,5	100,46
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	2	Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Yang Dipasarkan (ton)	110,0	66.607,72	-	-	-	92.929,72	139,51	59.650 (100%)	139,51
			Karet	108	14.877,30	-	-	-	19.699,90	132,41	13,5	132,41
			Sawit	111	51.730,42	-	-	-	73.229,70	142	46	142
3	Meningkatnya Pemasaran hasil tanaman perkebunan	3	Persentase Produksi hasil tanaman perkebunan yang dipasarkan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
			Karet	100%	100%				100%	100%	100%	100%
			Sawit	100%	100%				100%	100%	100%	100%

14. Kabid Hortikultura

No	Kinerja Utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024					Target Akhir Renstra (2024- 2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)	
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV			Capaian %
1.	Meningkatnya Luasan Tanaman Hortikultura	1	Persentase luas tanaman hortikultura	209,74	305				1.255	411	264 (100%)	411
			Cabe	110,83	270	-	-	-	1.208	448	180	448
			Bawang Merah	100	35	-	-	-	46,20	132	4	132
		2	Persentase luas panen tanaman hortikultura	103	360				877,70	244	300	244
			Cabe	102,5	325	-	-	-	855,75	263	250	263
			Bawang Merah	100	35	-	-	-	21,95	63	2	63
2	Meningkatnya Pemasaran hasil Tanaman Hortikultura		Persentase Produksi hasil tanaman Hortikultura yang dipasarkan	100%	100%				100%	100%	100%	100%
			Cabe	100%	100%				100%	100%	100%	100%
			Bawang Merah	100%	100%				100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pengembangan Tanaman Hias	1	Persentase tanaman hias yang dikembangkan	100%	1 jenis	-	-	-	1 jenis	100%	100%	100%

18. Kabid Tanaman Pangan

No	kinerja utama		Indikator	Capaian Thn lalu (Thn 2023)	Target dan capaian Tahun 2024					Target Akhir Renstra (2024-2026)	Capaian tahun 2024 terhadap target akhir renstra (%)	
					Target	TW I	TW II	TW III	TW IV			Capaian %
1.	Meningkatnya Indeks Pertanian (IP)	1	Persentase luas tanam tanaman pangan	68,92	56.707	-	-	-	52.180	92,02	86.618 (100%)	92,02
			Padi	61,02	36.169	-	-	-	35.895	99,24	60,037	99,24
			Jagung	78,17	20.538	-	-	-	16.285	79,29	26,53	79,29
		2	Persentase luas panen tanaman pangan	60,15	56,52				49.155	86,96	83.511(100%)	86,96
			Padi	49,55	36,025	-	-	-	32,747	90,90	58,282	90,90
			Jagung	79,73	20,49	-	-	-	16,04	80,05	25,18	80,05
2	Meningkatnya Pemasaran hasil Tanaman Pangan	1	Persentase Produksi hasil tanaman pangan yang dipasarkan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%
			Padi	100%	100%				100%	100%	100%	100%
			Jagung	100%	100%				100%	100%	100%	100%

Pelaihari, Januari 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Tanah Laut

Ir.M.Faried Widyatmoko
NIP.19680929 199503 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Datu Insad No. 77 Angsau 70814 Telp. (0512) 21008 Fax. (0512) 22882 - Pelaihari

Email : distanbun77@yahoo.co.id

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 S/D 2026
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024

1. Latar Belakang

Monitoring dan evaluasi sangat perlu untuk dilaksanakan mengingat penyusunan dokumen Renstra tahun 2024 s/d 2026 yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut seiring dan sejalan waktu Renstra yang telah dibuat dan disepakati oleh Dinas melalui proses rapat-rapat internal dan kebijakan atas rencana kerja kedepan dalam rangka pencapaian target kinerja di bidang Pertanian di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian target kinerja peningkatan produksi komoditas pertanian khususnya pada produk unggulan daerah berupa Padi, Jagung, Kedelai, bawang Merah, Cabe dan Sawit.

Pelaksanaan Renstra 2024 s/d 2026 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut merupakan pelaksanaan Renstra tahun ke I yang berarti pelaksanaan pekerjaan Dinas terhadap pencapaian Renstra sudah berjalan selama I tahun. Dalam pelaksanaan pencapaian Renstra sudah barang tentu banyak ditemui permasalahan dalam pencapaian persentase target produksi selama lima dalam dari rencana strategis yang telah disusun sesuai target komoditas pencapaian realisasi produksi pertahun .didasarkan atas capaian target nasional dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

2. Tujuan

Tujuan yang dilaksanakan monev Renstra adalah dalam rangka menemukan keselarasan pencapaian target produksi dan pencapaian persentase sesuai ketentuan teknis hasil perhitungan dan rumusan yang telah disepakati oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut sehingga menghasilkan persentase tingkat kenaikan dan penurunan produksi pada komoditas padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, karet dan sawit.

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dapat terpenuhinya data secara kuantitatif melalui proses perhitungan yang cermat terhadap tingkat produksi dalam pencapaian target produksi dan realisasi secara kuantitatif sesuai komoditas pertanian tersebut diatas

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Renstra tahun 2024

1. Pada saat pembahasan dengan Bappeda Kabupaten Tanah Laut terkait dengan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan adanya Renstra tahun 2024 s/d 2026 pada komoditas padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, karet dan sawit yang target produksi yang dibuat oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut yang dilaksanakan di Bappeda Kab. Tanah Laut.
2. Pelaksanaan rapat pada Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan perkebunan Kab. Tanah Laut di Aula Pertanian terkait tindak lanjut hasil pembahasan IKU dan Renstra tersebut. Dari hasil pelaksanaan monev tersebut diharapkan nantinya ada kesepakatan dalam penentuan target penurunan persentase produksi kenaikan pertahun yang menjadi dasar perhitungan target pebanding dari komoditas pertanian tersebut diatas.

5. Identifikasi persoalan terhadap Renstra

Renstra yang telah disusun oleh Dinas secara formal memenuhi target dan kriteria sesuai dengan kaidah-kaidah penulisannya, namun dalam proses perjalanan dari beberapa tahun berjalan yang merupakan tahun ke 1 dari pelaksanaan Renstra 2024 s/d 2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 s/d 2026 dalam mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Bertumpu Pada Pembangunan Industri Berbasis Pertanian, Kelautan, Pertambangan dan Pariwisata.

Persoalan yang menjadi dasar pada Renstra Dinas Pencapaian target Nasional presentase kenaikan produksi pertahun dari Kementerian Pertanian RI terhadap yang disesuaikan terhadap Renstra Dinas sebagai nilai ukur secara kuantitatif sehingga untuk memenuhi target tersebut Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus dapat mewujudkannya.

6. Permasalahan

Permasalahan yang ada dari hasil identifikasi tersebut adalah tingginya nilai target produksi yang dibuat selama lima tahun dari 2024 s/d 2026 dalam lampiran Renstra Dinas sehingga pada saat penyusunan Laporan Kinerja Khususnya dan laporan lainnya data disampaikan sesuai hasil perhitungan dengan secara tepat data capaian produksi dan realisasi pertahun setelah dibanding data statistik daerah target dan realisasi ada mengalami penurunan produksi pertahun.

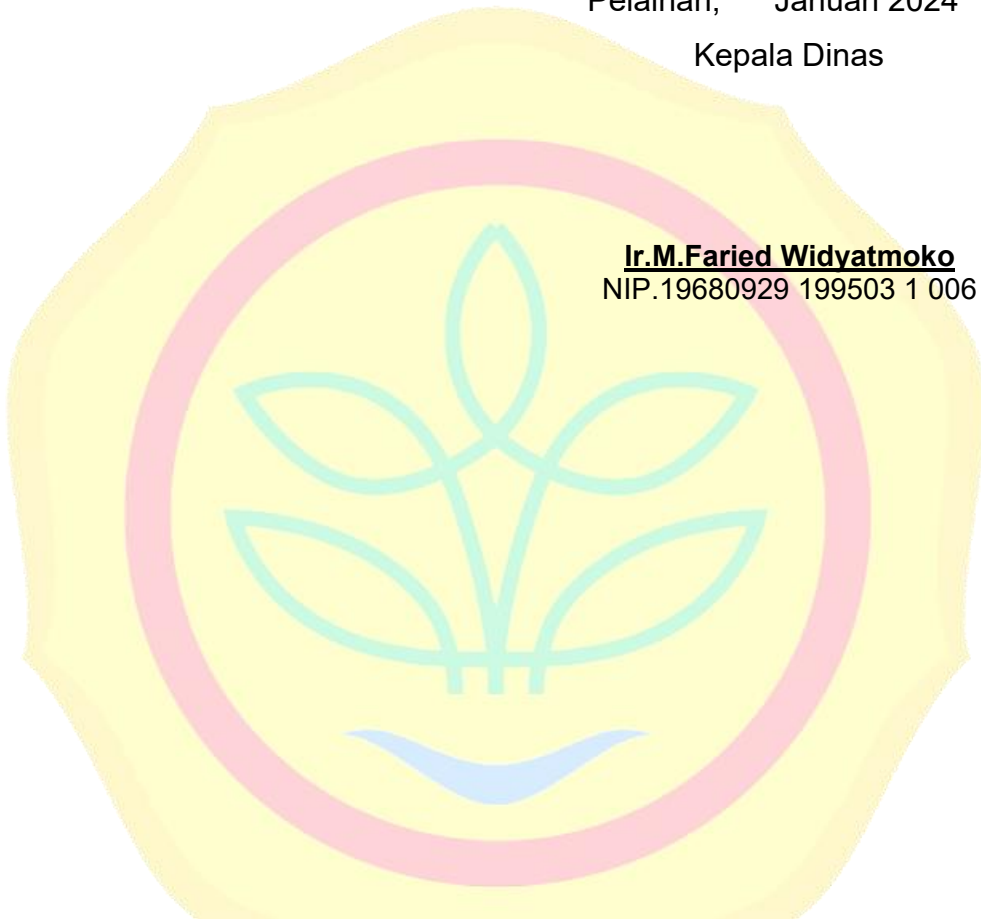
7. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari beberapa hasil money yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten, maka perlu nantinya untuk mengadakan perbaikan terhadap capaian target kenaikan produksi pertahun terutama pada komoditas jagung untuk Renstra Dinas tahun 2024 s/d 2026 yang akan dilaksanakan pada penyusunan Renstra Tahun 2025 s/d 2030, mengingat Batasan waktu, akan lebih tepat pada saat berakhirnya target Renstra Dinas Tahun 2024 yang dimulai untuk tahun 2025 sudah mulai disesuaikan dengan Renstra 2024 s/d 2026.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Dinas

Ir.M.Faried Widyatmoko
NIP.19680929 199503 1 006



TABEL KESELARASAN																		
NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerj a	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
	Meningkatkan produksi tanaman pertanian	Jumlah produksi Tanaman Pertanian	100%	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah produksi hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	100%	meningkatkan produksi tanaman pertanian	persentase peningkatan produksi tanaman pertanian	100%	peningkatnya produk komoditas pertanian	Persentase produksi pertanian		Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Jumlah produksi pertanian		Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	peningkatan jumlah produksitanaman pertanian	
					padi	144.300					Padi	144.300		padi	144.300	padi	padi	
					Jagung	123.136					Jagung	123.136		Jagung	123.136	Jagung	Jagung	
					Cabe	2.370,10					Cabe	2.370,10		Cabe	2.370,10	Cabe	Cabe	
					Bawang Merah	1123					Bawang Merah	1123		Bawang Merah	1123	Bawang Merah	Bawang Merah	
					Karet	15.182,30					Karet	15.182,30		Karet	15.182,30	Karet	Karet	
					Kelapa Sawit	52.920,21					Kelapa Sawit	52.920,21		Kelapa Sawit	52.920,21	Kelapa Sawit	Kelapa Sawit	
				Meningkat Penerapan Tata Kelola Keperintahan yang Baik di SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	B				Meningkat Penerapan Tata Kelola Keperintahan yang Baik di SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	B	Meningkat Penerapan Tata Kelola Keperintahan yang Baik di SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	B	Meningkat Penerapan Tata Kelola Keperintahan yang Baik di SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi	
				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP	B				Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP	B	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaandan Keuangan	Nilai SAKIP	B	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaandan Keuangan	Nilai SAKIP	
					Persentase Terkelolanya Administarsi Umum, Kepegawaian yang Baik dan Tepat Waktu	100%					Persentase Terkelolanya Administarsi Umum, Kepegawaian yang Baik dan Tepat Waktu	100%		Persentase Terkelolanya Administarsi Umum, Kepegawaian yang Baik dan Tepat Waktu	100%		Persentase Terkelolanya Administarsi Umum, Kepegawaian yang Baik dan Tepat Waktu	
					Persentase Terkelolanya Administarsi Perencanaan yang Baik dan Tepat Waktu	100%					Persentase Terkelolanya Administarsi Perencanaan yang Baik dan Tepat Waktu	100%		Persentase Terkelolanya Administarsi Perencanaan yang Baik dan Tepat Waktu	100%		Persentase Terkelolanya Administarsi Perencanaan yang Baik dan Tepat Waktu	
					Persentase Terkelolanya Administarsi Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%					Persentase Terkelolanya Administarsi Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%		Persentase Terkelolanya Administarsi Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	100%		Persentase Terkelolanya Administarsi Keuangan yang Baik dan Tepat Waktu	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
				Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	100%				Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	100%	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	100%	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dikelola dan dapat dimanfaatkan	
				Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Persyaratan Saurat Menyurat	4 Dokumen				Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Persyaratan Saurat Menyurat	4 Dokumen	Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Persyaratan Saurat Menyurat	4 Dokumen	Merencanakan dan Mengadakan Sarana dan Prasarana serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Persyaratan Saurat Menyurat	
					Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani secara tertib	148 Orang					Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani secara tertib	148 Orang		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayani secara tertib	148 Orang		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilayanisecara tertib	
					Jumlah yang mengikuti pelatihan bersertifikat	5 Orang					Jumlah yang mengikuti pelatihan bersertifikat	5 Orang		Jumlah yang mengikuti pelatihan bersertifikat	5 Orang		Jumlah yang mengikuti pelatihan bersertifikat	
					Jumlah Asset Inventaris yang dikelola	4.173 Asset					Jumlah Asset Inventaris yang dikelola	4.173 Asset		Jumlah Asset Inventaris yang dikelola	4.173 Asset		Jumlah Asset Inventarisyang dikelola	
					Jumlah Asset Inventaris yang dihapus	55 Asset					Jumlah Asset Inventaris yang dihapus	55 Asset		Jumlah Asset Inventaris yang dihapus	55 Asset		Jumlah Asset Inventarisyang dihapus	
				Menyusun Perencanaan yang Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan program aplikasi	7 Dokumen				Menyusun Perencanaan yang Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan program aplikasi	7 Dokumen	Menyusun Perencanaan yang Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan program aplikasi	7 Dokumen	Menyusun Perencanaan yang Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan program aplikasi	
				Menyusun Laporan Kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen				Menyusun Laporan Kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	Menyusun Laporan Kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	Menyusun Laporan Kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen kinerja yang disusun sesuai ketentuan	
					Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	B					Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	B		Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	B		Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	
					Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	B					Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	B		Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	B		Nilai Komponen perencanaan pada LAKIP Distanhorbun	
				Menyusun dan Merencanakan Kebutuhan dan Administarsi Keuangan Dinas	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	12 Dokumen				Menyusun dan Merencanakan Kebutuhan dan Administarsi Keuangan Dinas	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Menyusun dan Merencanakan Kebutuhan dan Administarsi Keuangan Dinas	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	12 Dokumen	Menyusun dan Merencanakan Kebutuhan dan Administarsi Keuangan Dinas	Jumlah Usulan Dokumen Administrasi Keuangan	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
				Membuat Laporan Pertanggung Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi yang Terlaporkan (Calk) LRA, LO, Neraca, LPE	1 Dokumen				Membuat Laporan Pertanggung Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi yang Terlaporkan (Calk) LRA, LO, Neraca, LPE	1 Dokumen	Membuat Laporan Pertanggung Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi yang Terlaporkan (Calk) LRA, LO, Neraca, LPE	1 Dokumen	Membuat Laporan Pertanggung Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi yang Terlaporkan (Calk)LRA, LO, Neraca, LPE	
					Jumlah Dokumen realisasi SPJ yang dipertanggung Jawabkan (2400) SPJ	2.400 Dokumen					Jumlah Dokumen realisasi SPJ yang dipertanggung Jawabkan (2400) SPJ	2.400 Dokumen		Jumlah Dokumen realisasi SPJ yang dipertanggung Jawabkan (2400) SPJ	2.400 Dokumen		Jumlah Dokumen realisasiSPJ yang dipertanggung Jawabkan (2400) SPJ	
				Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Persentase luas Tanam Tanaman Pangan	81.346 Ha (100)%				Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Persentase luas Tanam Tanaman Pangan	81.346 Ha (100)%	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Persentase luas Tanam Tanaman Pangan	81.346 Ha (100)%	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP)	Persentase luas TanamTanaman Pangan	
					Persentase luas Panen Tanaman Pangan	76.952 Ha (100) %					Persentase luas Panen Tanaman Pangan	76.952 Ha (100) %		Persentase luas Panen Tanaman Pangan	76.952 Ha (100) %		Persentase luas Panen Tanaman Pangan	
				Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Pangan yang dipasarkan	100%				Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Pangan yang dipasarkan	100%	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Pangan yang dipasarkan	100%	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Persentase Produksi HasilTanaman Pangan yang dipasarkan	
				Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan	100%				Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan	100%	Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan	100%	Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Pangan	Persentase Teknologi TepatGuna yang diterapkan	
				Melakukan Fasilitas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah Peningkatan Paroduksi Tanaman Pangan	44 Kwintal				Melakukan Fasilitas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah Peningkatan Paroduksi Tanaman Pangan	44 Kwintal	Melakukan Fasilitas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah Peningkatan Paroduksi Tanaman Pangan	44 Kwintal	Melakukan Fasilitas Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Jumlah Peningkatan Paroduksi Tanaman Pangan	
				Melakukan Fasilitas Bantuan Peningkat Produksi Tanaman Pangan Kepada Kelompok Tani	Jumlah Saprodi yang di Distribusikan Kepada Kelompok Tani	242 Liter				Melakukan Fasilitas Bantuan Peningkat Produksi Tanaman Pangan Kepada Kelompok Tani	Jumlah Saprodi yang di Distribusikan Kepada Kelompok Tani	242 Liter	Melakukan Fasilitas Bantuan Peningkat Produksi Tanaman Pangan Kepada Kelompok Tani	Jumlah Saprodi yang di Distribusikan Kepada Kelompok Tani	242 Liter	Melakukan Fasilitas Bantuan Peningkat Produksi Tanaman Pangan Kepada Kelompok Tani	Jumlah Saprodi yang di Distribusikan Kepada Kelompok Tani	
				Melaksanakan Aplikasi Teknologi Tanaman Pangan di Kelompok Tani	Jumlah Terfasilitasi Kelompok Tani untuk Pengaplikasian Teknologi	286 Kelompok Tani				Melaksanakan Aplikasi Teknologi Tanaman Pangan di Kelompok Tani	Jumlah Terfasilitasi Kelompok Tani untuk Pengaplikasian Teknologi	286 Kelompok Tani	Melaksanakan Aplikasi Teknologi Tanaman Pangan di Kelompok Tani	Jumlah Terfasilitasi Kelompok Tani untuk Pengaplikasian Teknologi	286 Kelompok Tani	Melaksanakan Aplikasi Teknologi Tanaman Pangandi Kelompok Tani	Jumlah Terfasilitasi Kelompok Tani untuk Pengaplikasian Teknologi	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
				Melakukan Peningkatan dan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Benih Unggul yang bersertifikat terbagi di Kelompok Tani (Pajale)	956 Ton				Melakukan Peningkatan dan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Benih Unggul yang bersertifikat terbagi di Kelompok Tani (Pajale)	956 Ton	Melakukan Peningkatan dan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Benih Unggul yang bersertifikat terbagi di Kelompok Tani (Pajale)	956 Ton	Melakukan Peningkatan dan Fasilitas Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Benih Unggul yang bersertifikat terbagi di Kelompok Tani (Pajale)	
				Melaksanakan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan	Jumlah Saprodi yang terbagi di Kelompok Tani	40.498 Liter				Melaksanakan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan	Jumlah Saprodi yang terbagi di Kelompok Tani	40.498 Liter	Melaksanakan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan	Jumlah Saprodi yang terbagi di Kelompok Tani	40.498 Liter	Melaksanakan Pengembangan Teknologi Tanaman Pangan	Jumlah Saprodi yang terbagi di Kelompok Tani	
					Jumlah Peserta Pelatihan/Pertemuan Pengembangan Tanaman Pangan	911 Orang					Jumlah Peserta Pelatihan/Pertemuan Pengembangan Tanaman Pangan	911 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan/Pertemuan Pengembangan Tanaman Pangan	911 Orang		Jumlah Peserta Pelatihan/Pertemuan Pengembangan Tanaman Pangan	
				Melakukan Penerapan Teknologi dalam Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Alsintan Pasca Panen yang dimanfaatkan Kelompok Tani	4 Jenis				Melakukan Penerapan Teknologi dalam Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Alsintan Pasca Panen yang dimanfaatkan Kelompok Tani	4 Jenis	Melakukan Penerapan Teknologi dalam Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Alsintan Pasca Panen yang dimanfaatkan Kelompok Tani	4 Jenis	Melakukan Penerapan Teknologi dalam Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah Alsintan Pasca Panen yang dimanfaatkan Kelompok Tani	
				Memberikan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pasca Panen	Jumlah Fasilitas Bantuan Prasarana dan Sarana Pasca Panen	3 Jenis				Memberikan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pasca Panen	Jumlah Fasilitas Bantuan Prasarana dan Sarana Pasca Panen	3 Jenis	Memberikan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pasca Panen	Jumlah Fasilitas Bantuan Prasarana dan Sarana Pasca Panen	3 Jenis	Memberikan Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Pasca Panen	Jumlah Fasilitas Bantuan Prasarana dan Sarana Pasca Panen	
				Meningkatnya Luas Tanaman Hortikultura	Persentase Luas Tanaman Hortikultura	473,92 Ha (100) %				Meningkatnya Luas Tanaman Hortikultura	Persentase Luas Tanaman Hortikultura	473,92 Ha (100) %	Meningkatnya Luas Tanaman Hortikultura	Persentase Luas Tanaman Hortikultura	473,92 Ha (100) %	Meningkatnya Luas Tanaman Hortikultura	Persentase Luas Tanaman Hortikultura	
					Persentase Luas Panen Hortikultura	350,50 Ha (73,95) %					Persentase Luas Panen Hortikultura	350,50 Ha (73,95) %		Persentase Luas Panen Hortikultura	350,50 Ha (73,95) %		Persentase Luas Panen Hortikultura	
				Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Persentase Produksi Hasil Tanaman Hortikultura yang dipasarkan	100%				Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Persentase Produksi Hasil Tanaman Hortikultura yang dipasarkan	100%	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Persentase Produksi Hasil Tanaman Hortikultura yang dipasarkan	100%	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	Persentase Produksi Hasil Tanaman Hortikultura yang dipasarkan	
				Meningkatkan Pengembangan Tanaman Hias	Persentase Tanaman Hias yang dikembangkan	1 Tanaman (100) %				Meningkatkan Pengembangan Tanaman Hias	Persentase Tanaman Hias yang dikembangkan	1 Tanaman (100) %	Meningkatkan Pengembangan Tanaman Hias	Persentase Tanaman Hias yang dikembangkan	1 Tanaman (100) %	Meningkatkan Pengembangan Tanaman Hias	Persentase Tanaman Hias yang dikembangkan	
				Melaksanakan Perlindungan dan Perbaikan Hortikultura	Jumlah Petani Penangkar Hortikultura	30 Orang				Melaksanakan Perlindungan dan Perbaikan Hortikultura	Jumlah Petani Penangkar Hortikultura	30 Orang	Melaksanakan Perlindungan dan Perbaikan Hortikultura	Jumlah Petani Penangkar Hortikultura	30 Orang	Melaksanakan Perlindungan dan Perbaikan Hortikultura	Jumlah Petani Penangkar Hortikultura	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
					Jumlah Petani yang Melakukan Pengendalian Hama dan Penyakit Hortikultura	60 Orang					Jumlah Petani yang Melakukan Pengendalian Hama dan Penyakit Hortikultura	60 Orang		Jumlah Petani yang Melakukan Pengendalian Hama dan Penyakit Hortikultura	60 Orang		Jumlah Petani yang Melakukan Pengendalian Hama dan Penyakit Hortikultura	
				Melakukan Fasilitasi Benih Unggul	Termanfaatkan laboratorium Kultur Jaringan	1 Lab				Melakukan Fasilitasi Benih Unggul	Termanfaatkan laboratorium Kultur Jaringan	1 Lab	Melakukan Fasilitasi Benih Unggul	Termanfaatkan laboratorium Kultur Jaringan	1 Lab	Melakukan Fasilitasi Benih Unggul	Termanfaatkan laboratorium Kultur Jaringan	
				Melaksanakan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Melaksanakan Kontes Buah	Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pelatihan pengolahan produk Hortikultura	3 Kelompok Tani				Melaksanakan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Melaksanakan Kontes Buah	Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pelatihan pengolahan produk Hortikultura	3 Kelompok Tani	Melaksanakan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Melaksanakan Kontes Buah	Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pelatihan pengolahan produk Hortikultura	3 Kelompok Tani	Melaksanakan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Melaksanakan Kontes Buah	Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan pelatihan pengolahan produk Hortikultura	
					Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan bantuan alat pengolahan produk Hortikultura	3 Kelompok Tani					Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan bantuan alat pengolahan produk Hortikultura	3 Kelompok Tani		Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan bantuan alat pengolahan produk Hortikultura	3 Kelompok Tani		Jumlah Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani yang mendapatkan bantuan alat pengolahan produk Hortikultura	
					Jumlah Pelaksanaan Kontes Buah	1 Kali					Jumlah Pelaksanaan Kontes Buah	1 Kali		Jumlah Pelaksanaan Kontes Buah	1 Kali		Jumlah Pelaksanaan Kontes Buah	
				Melakukan Pengembangan Hortikultura	Jumlah Kawasan Pengembangan Hortikultura	298 Ha				Melakukan Pengembangan Hortikultura	Jumlah Kawasan Pengembangan Hortikultura	298 Ha	Melakukan Pengembangan Hortikultura	Jumlah Kawasan Pengembangan Hortikultura	298 Ha	Melakukan Pengembangan Hortikultura	Jumlah Kawasan Pengembangan Hortikultura	
				Melaksanakan Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	Jumlah Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	7 Unit				Melaksanakan Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	Jumlah Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	7 Unit	Melaksanakan Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	Jumlah Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	7 Unit	Melaksanakan Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	Jumlah Pinjam Pakai Brigade Alsintan Hortikultura	
				Melaksanakan Bantuan Saprodi Tanaman Hortikultura	Jumlah Bimtek Hortikultura	180 Orang				Melaksanakan Bantuan Saprodi Tanaman Hortikultura	Jumlah Bimtek Hortikultura	180 Orang	Melaksanakan Bantuan Saprodi Tanaman Hortikultura	Jumlah Bimtek Hortikultura	180 Orang	Melaksanakan Bantuan Saprodi Tanaman Hortikultura	Jumlah Bimtek Hortikultura	
					Jumlah Bibit Hortikultura yang diberikan	643 Pohon					Jumlah Bibit Hortikultura yang diberikan	643 Pohon		Jumlah Bibit Hortikultura yang diberikan	643 Pohon		Jumlah Bibit Hortikultura yang diberikan	
				Meningkatnya Luasan Areal Tanaman Perkebunan	Persentase Luas Areal Tanaman Perkebunan	100%				Meningkatnya Luasan Areal Tanaman Perkebunan	Persentase Luas Areal Tanaman Perkebunan	100%	Meningkatnya Luasan Areal Tanaman Perkebunan	Persentase Luas Areal Tanaman Perkebunan	100%	Meningkatnya Luasan Areal Tanaman Perkebunan	Persentase Luas Areal Tanaman Perkebunan	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
				Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Persentase Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	103%				Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Persentase Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	103%	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Persentase Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	103%	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Persentase Pr oduksi Komoditas Un ggulanPerkebunan	
				Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Tanaman yang dipasarkan	100%				Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Perkebunan yang dipasarkan	100%	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Perkebunan yang dipasarkan	100%	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Perkebunan yang dipasarkan	
				Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan	100%				Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan	100%	Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan	Persentase Teknologi Tepat Guna yang diterapkan	100%	Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan	Persentase Teknologi TepatGuna yang diterapkan	
				Peningkatan Perbaikan mutu panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan perkebunan rakyat	Jumlah UPPB yang menggunakan pembeku yang dianjurkan pemerintah	18 UPPB				Peningkatan Perbaikan mutu panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan perkebunan rakyat	Jumlah UPPB yang menggunakan pembeku yang dianjurkan pemerintah	18 UPPB	Peningkatan Perbaikan mutu panen, pengolahan, pemasaran hasil dan kemitraan perkebunan rakyat	Jumlah UPPB yang menggunakan pembeku yang dianjurkan pemerintah	18 UPPB	Peningkatan Perbaikan mutu panen, pengolahan,pemasaran hasil dan kemitraan perkebunan rakyat	Jumlah UPPB yang menggunakan pembeku yang dianjurkan pemerintah	
				Melakukan Pembentukan UPPB	Jumlah UPPB yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut	6 UPPB				Melakukan Pembentukan UPPB	Jumlah UPPB yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut	6 UPPB	Melakukan Pembentukan UPPB	Jumlah UPPB yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut	6 UPPB	Melakukan Pembentukan UPPB	Jumlah UPPB yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut	
				Tertindaklanjuti pemberian surat tanda terima registrasi UPPB terhadap Kelompok Tani Karet , Kelompok Petani Karet	Jumlah UPPB yang terdaftar/terregistrasi	8 UPPB				Tertindaklanjuti pemberian surat tanda terima registrasi UPPB terhadap Kelompok Tani Karet , Kelompok Petani Karet	Jumlah UPPB yang terdaftar/terregistrasi	8 UPPB	Tertindaklanjuti pemberian surat tanda terima registrasi UPPB terhadap Kelompok Tani Karet , Kelompok Petani Karet	Jumlah UPPB yang terdaftar/terregistrasi	8 UPPB	Tertindaklanjuti pemberian surat tanda terima registrasiUPPB terhadap Kelompok Tani Karet , Kelompok Petani Karet	Jumlah UPPB yang terdaftar/terregistrasi	
				Melakukan Kemitraan UPPB dengan pabrik crub rubber	Jumlah UPPB yang bermitra dengan pabrik crum rubber	18 UPPB				Melakukan Kemitraan UPPB dengan pabrik crub rubber	Jumlah UPPB yang bermitra dengan pabrik crum rubber	18 UPPB	Melakukan Kemitraan UPPB dengan pabrik crub rubber	Jumlah UPPB yang bermitra dengan pabrik crum rubber	18 UPPB	Melakukan Kemitraan UPPB dengan pabrik crubrubber	Jumlah UPPB yang bermitradengan pabrik crum rubber	
				Melakukan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Tanaman Sawit dan Karet untuk Peremajaan	500 Ha				Melakukan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Tanaman Sawit dan Karet untuk Peremajaan	500 Ha	Melakukan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Tanaman Sawit dan Karet untuk Peremajaan	500 Ha	Melakukan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Tanaman Sawitdan Karet untuk Peremajaan	
					Jumlah Identifikasi Lahan Perkebunan untuk Peremajaan	500 Ha					Jumlah Identifikasi Lahan Perkebunan untuk Peremajaan	500 Ha		Jumlah Identifikasi Lahan Perkebunan untuk Peremajaan	500 Ha		Jumlah Identifikasi Lahan Perkebunan untukPeremajaan	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
				Melakukan sosialisasi pembuatan STD-B Kepada Petani	Jumlah Peserta yang hadir mengikuti Sosialisasi STD-B	150 Orang				Melakukan sosialisasi pembuatan STD-B Kepada Petani	Jumlah Peserta yang hadir mengikuti Sosialisasi STD-B	150 Orang	Melakukan sosialisasi pembuatan STD-B Kepada Petani	Jumlah Peserta yang hadir mengikuti Sosialisasi STD-B	150 Orang	Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan	Persentase Pr oduksi Komoditas UnggulanPerkebunan	
				Melakukan Penerbitan STPD pada Petani Sawit	Jumlah STPD yang diterbitkan	75 Surat				Melakukan Penerbitan STPD pada Petani Sawit	Jumlah STPD yang diterbitkan	75 Surat	Melakukan Penerbitan STPD pada Petani Sawit	Jumlah STPD yang diterbitkan	75 Surat	Meningkatnya Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Persentase Produksi Hasil Tanaman Perkebunan yang dipasarkan	
				Melaksanakan Perlindungan dan Standarisasi Perbenihan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Perkebunan	2.700 Ha				Melaksanakan Perlindungan dan Standarisasi Perbenihan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Perkebunan	2.700 Ha	Melaksanakan Perlindungan dan Standarisasi Perbenihan Perkebunan	Jumlah Pengendalian OPT Perkebunan	2.700 Ha	Meningkatnya Penerapan Teknologi Tanaman Perkebunan	Persentase Teknologi TepatGuna yang diterapkan	
					Jumlah Surat Persetujuan Penyaluran Benih SP2B-KS Kelapa Sawit yang di terbitkan	20 Dokumen					Jumlah Surat Persetujuan Penyaluran Benih SP2B-KS Kelapa Sawit yang di terbitkan	20 Dokumen		Jumlah Surat Persetujuan Penyaluran Benih SP2B-KS Kelapa Sawit yang di terbitkan	20 Dokumen	Peningkatan Perbaikan mutu panen, pengolahan,pemasaran hasil dan kemitraan perkebunan rakyat	Jumlah UPPB yang menggunakan pembeku yang dianjurkan pemerintah perkebunan rakyat	
				Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM Penyuluh yang Bersertifikat	15,6%				Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM Penyuluh yang Bersertifikat	15,6%	Meningkatnya SDM Penyuluh dan Kelompok Tani	Persentase SDM Penyuluh yang Bersertifikat	15,6%	Melakukan Pembentukan UPPB	Jumlah UPPB yang terbentuk di Kabupaten Tanah Laut	
					Persentase Kelompok Tani yang Trampil	1.700 Orang (60) %					Persentase Kelompok Tani yang Trampil	1.700 Orang (60) %		Persentase Kelompok Tani yang Trampil	1.700 Orang (60) %	Tertindaklanjuti pemberian surat tanda terima registrasiUPPB terhadap Kelompok Tani Karet , Kelompok Petani Karet	Jumlah UPPB yang terdaftar/terregistrasi	
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Alsintan yang dapat di manfaatkan	180 Buah (100) %				Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Persentase Alsintan yang dapat di	180 Buah (100) %	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase Alsintan yang dapat di manfaatkan	180 Buah (100) %	Melakukan Kemitraan UPPB dengan pabrik crum rubber	Jumlah UPPB yang bermitradengan pabrik crum rubber	
					Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Pupuk Bersubsidi	15.695 Orang (100) %					Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Pupuk Bersubsidi	15.695 Orang (100) %		Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Pupuk Bersubsidi	15.695 Orang (100) %	Melakukan Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Luas Tanaman Sawitdan Karet untuk Peremajaan	
					Persentase Penampungan Air yang Baik dan dapat dimanfaatkan	3 Unit (100) %					Persentase Penampungan Air yang Baik dan dapat dimanfaatkan	3 Unit (100) %		Persentase Penampungan Air yang Baik dan dapat dimanfaatkan	3 Unit (100) %		Jumlah Identifikasi Lahan Perkebunan untukPeremajaan	
					Persentase Jaringan Irigasi Tersier yang baik dan dapat dimanfaatkan	15 Unit (100) %					Persentase Jaringan Irigasi Tersier yang baik dan dapat dimanfaatkan	15 Unit (100) %		Persentase Jaringan Irigasi Tersier yang baik dan dapat dimanfaatkan	15 Unit (100) %			
					Persentase Jalan Usaha Tani yang dapat dimanfaatkan	15 Unit (100) %					Persentase Jalan Usaha Tani yang dapat dimanfaatkan	15 Unit (100) %		Persentase Jalan Usaha Tani yang dapat dimanfaatkan	15 Unit (100) %			
					Persentase Jalan Produksi yang dapat dimanfaatkan	7 Unit (100) %					Persentase Jalan Produksi yang dapat dimanfaatkan	7 Unit (100) %		Persentase Jalan Produksi yang dapat dimanfaatkan	7 Unit (100) %			

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
				Melaksanakan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian	100 Orang				Melaksanakan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian	00 Oran	Melaksanakan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian	100 Orang	Melaksanakan Kegiatan Penyuluh	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Penyuluh Pertanian	
					Jumlah Penyuluh Pertanian yang Melaksanakan penerapan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	70 Orang					Jumlah Penyuluh Pertanian yang Melaksanakan penerapan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	70 Orang		Jumlah Penyuluh Pertanian yang Melaksanakan penerapan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	70 Orang		Jumlah Penyuluh Pertanian yang Melaksanakan penerapan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	
					Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	500 Orang					Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	500 Orang		Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	500 Orang		Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	
					Jumlah Kelompok Tani yang Mengadopsi informasi teknologi pertanian	1. 000 Kelompok Tani					Jumlah Kelompok Tani yang Mengadopsi informasi teknologi pertanian	1. 000 Kelompok Tani		Jumlah Kelompok Tani yang Mengadopsi informasi teknologi pertanian	1. 000 Kelompok Tani		Jumlah Kelompok Tani yang Mengadopsi informasi teknologi pertanian	
					Jumlah Peningkatan Penyuluh Swadaya	40 Orang					Jumlah Peningkatan Penyuluh Swadaya	40 Orang		Jumlah Peningkatan Penyuluh Swadaya	40 Orang		Jumlah Peningkatan Penyuluh Swadaya	
				Melaksanakan Fasilitas petani dalam mengakomodir alsintan	Jumlah dokumen pinjam pakai alsintan yang bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Tani	180 Dokumen				Melaksanakan Fasilitas petani dalam mengakomodir alsintan	Jumlah dokumen pinjam pakai alsintan yang bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Tani	180 Dokumen	Melaksanakan Fasilitas petani dalam mengakomodir alsintan	Jumlah dokumen pinjam pakai alsintan yang bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Tani	180 Dokumen	Melaksanakan Fasilitas petani dalam mengakomodir alsintan	Jumlah dokumen pinjam pakai alsintan yang bisa dimanfaatkan oleh Kelompok Tani	
				Tersalurnya Pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani	Terbitnya Kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi	12 dokumen / 12 kios				Tersalurnya Pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani	Terbitnya Kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi	12 dokumen / 12 kios	Tersalurnya Pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani	Terbitnya Kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi	12 dokumen / 12 kios	Tersalurnya Pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani	Terbitnya Kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi	
					Jumlah Kelompok Tani/Petani yang memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi	21.000 Orang					Jumlah Kelompok Tani/Petani yang memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi	21.000 Orang		Jumlah Kelompok Tani/Petani yang memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi	21.000 Orang		Jumlah Kelompok Tani/Petani yang memperoleh fasilitas pupuk bersubsidi	
				Melakukan Pengembangan/rehabilitas infrastruktur pertanian/perkebunan/hortikultura	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara	3 Unit				Melakukan Pengembangan/rehabilitas infrastruktur pertanian/perkebunan/hortikultura	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara	3 Unit	Melakukan Pengembangan/rehabilitas infrastruktur pertanian/perkebunan/hortikultura	Jumlah terbangunnya Long Stroge	3 Unit	Melakukan Pengembangan/rehabilitas infrastruktur pertanian/perkebunan/hortikultura	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi , dan dipelihara	

NO	LAPKIN 2024						RENSTRA 2024 - 2026 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024			Cashcading 2024		catatan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	
					Jumlah terbangunnya embung	3 Unit					Jumlah terbangunnya embung	3 Unit		Jumlah terbangunnya embung	3 Unit		Jumlah terbang unnya embung	
					Jumlah terbangunnya jalan usaha tani/jalan produksi	28 Unit					Jumlah terbangunnya jalan usaha tani	28 Unit		Jumlah terbangunnya jalan usaha tani	28 Unit		Jumlah terbangunnya jalanusaha tani	



